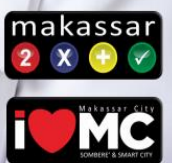




RENCANA STRATEGIS RENSTRA

DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Perpustakaan Kota Makassar dapat Menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Secara substantif Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar sejalan dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua”. Dinas perpustakaan berkontribusi pada misi satu revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mengacu pada berbagai dokumen perubahan perencanaan pembangunan Kota Makassar yang relevan, sehingga sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar secara umum. Dengan keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kota Makassar diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021 – 2026, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi Dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders).

Makassar, 3 September 2021



KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA MAKASSAR

Denri A. Palallo, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680412 199603 2005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	15
2.1 TUGAS,FUNGSI DASTRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	25
2.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	41
2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	51
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH.....	51
3.2 TELAAHAN VISI,MISI,DAN PROGRAM KEPALA DAERAH.....	54
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	63
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUP HIDUP STRATEGIS (KLHS)	72
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	73
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	77
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan dan penyelenggaraan perpustakaan merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Semangat kerja perpustakaan sebagai sebuah lembaga pelayanan informasi dan pengetahuan masyarakat, mewajibkan sebuah relasi harmonis antara perpustakaan, pemerintah, masyarakat dan unsur stakeholder lainnya. Hal ini tercantum pada Bab II UU No 43/2007 tentang hak, kewajiban dan kewenangan setiap pihak yang tergabung dalam proses relasi tersebut. Paling tidak ada tiga pihak yang saling terkait dalam misi mengembangkan organisasi pelayanan public perpustakaan tadi yaitu masyarakat, pemerintah pusat, dan Pemerintah daerah.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat harus dikembangkan dan didayagunakan agar dapat mendorong tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat sebagai ciri masyarakat pembelajar serta dapat mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat diperpustakaan. Dinas Perpustakaan Kota Makassar melaksanakan tugas Pemerintah dibidang Perpustakaan yang merupakan urusan wajib pemerintahan dalam membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) maupun rencana/program, kerja pengembangan lembaga (organisasi perangkat Daerah) secara profesional dan Implementasi yang berisis tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Juga visi dan Misi.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Strategis Dinas Perpustakaan Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 5 ayat 3, disebutkan bahwa “Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. ”Yang merupakan penjabaran dari visi yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dan RPJMN dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar. Secara substansi Undang-Undang ini mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat Dokumen Perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai dasar dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Renstra adalah Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD pemerintah Kota Makassar dengan mengutamakan kewenangan Wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai

dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk itu Renstra akan menjadi dasar perencanaan tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan Republik Indonesia, maka muncul dinamika yang berhubungan langsung dengan etos pelayanan perpustakaan yang selama ini telah di terapkan melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Implikasi administrasi adalah bahwa penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan menciptakan penyelarasan dalam struktur organisasi. Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar atas layanan bahan pustaka dan informasi. Dinas Perpustakaan Kota Makassar mempunyai peran dalam meningkatkan pembangunan bidang perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan budaya baca dan gemar berkunjung ke perpustakaan dengan motto perpustakaan “ingin lebih dekat dan bersahabat”.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang merupakan dokumen rencana pembangunan yang berisikan upaya-upaya membangun pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan pembinaan dan layanan perpustakaan yang dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis, program kegiatan, indikator dan target serta kerangka pendanaan dan kerangka regulasi yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen dapat ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang berfokus dan terukur serta menunjang pencapaian

sasaran pembangunan kota Makassar menjadi dua kali tambah baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses

perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.

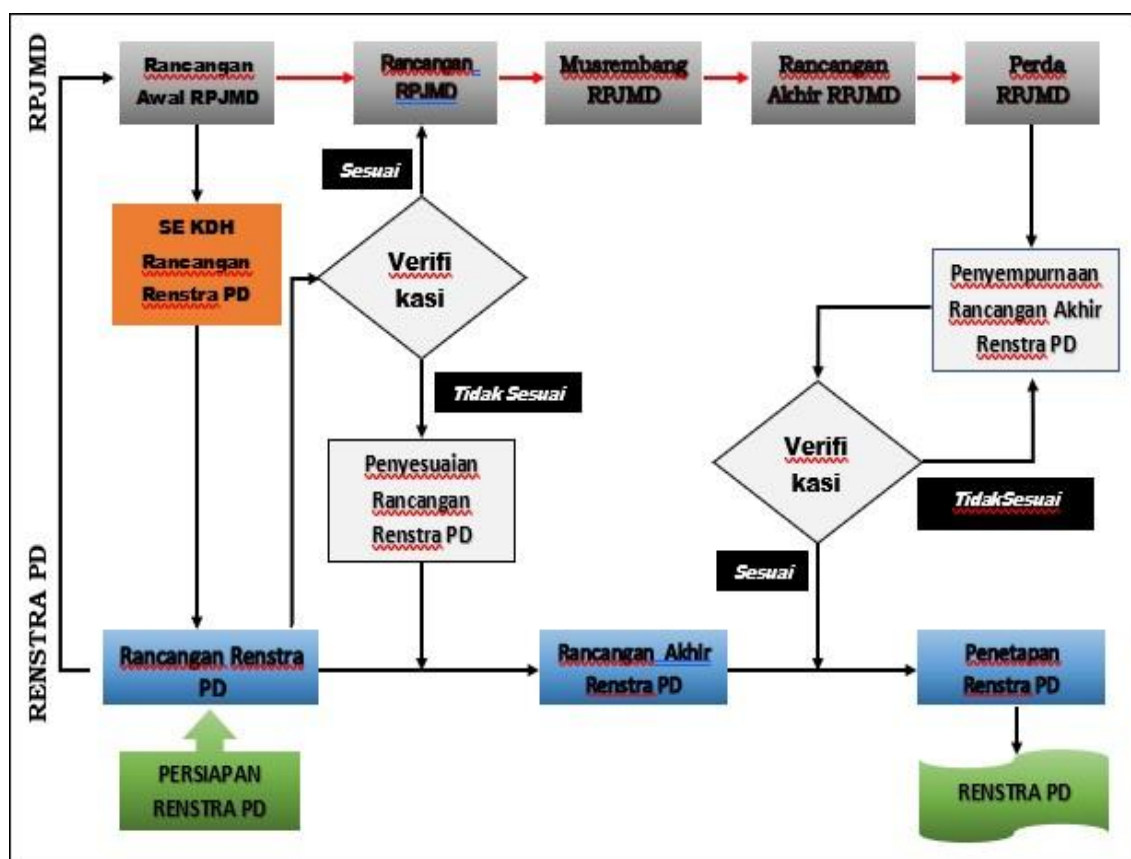
Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan Kota Makassar selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintah non Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Perpustakaan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 melalui beberapa tahapan. Tahapan teknis secara detail penyusunam Rencana Strategis mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021–2026:

1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
3. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 maka Dinas Perpustakaan Kota Makassar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah. Dan dapat dilihat pada Gambar. Adapun bagan alur dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Startegis Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang _undang Nomor 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 99 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3
46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015- 2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
48. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
49. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2020);
50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar tahun 2020 Nomor 7);

1.3. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi dan Program Walikota Makassar yang digambarkan dalam bentuk program yang memuat tujuan, sasaran.

strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan pendanaan secara indikatif dengan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tujuan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Makassar;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
3. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
4. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan.

1.4 TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah:

1. Menjamin keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Makassar;
2. Sebagai pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap pencapaian hasil yang diinginkan. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan

kegiatan.

3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 202-2026 di susun sesuai dengan amanat Peraturan dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 207 yang terdiri dari 8 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaah visi, misi, dan program Walikota Kota Makassar periode 202 - 2026, telaah Renstra K/L, talaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar 202-2026 berdasarkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Makassar 202-2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Dinas Perpustakaan dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan kerja Dinas Perpustakaan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar 2022-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar 2022-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam pendirian perpustakaan tentu disusun pula tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Sutarno dalam Suwarno (2011: 21) menyebutkan bahwa terdapat 3 tugas perpustakaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tugas menghimpun informasi meliputi kegiatan mencari, menyeleksi, dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai dan lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai serta mutakhir
2. Tugas mengelola, meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri kembali (temu balik informasi) dan diakses oleh pemakai, serta merawat bahan pustaka
3. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal

Peraturan Walikota Makassar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perpustakaan, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Dinas Perpustakaan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas terurai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada Dinas Perpustakaan;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program- program

pada kegiatan sekretariat dan pada bidang-bidang yang ada pada Dinas Perpustakaan

4. Merumuskan rencana Strategis (Renstra) dan Renca Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
5. Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang dan tugasnya;
6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dinas;
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
8. Mengkordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. Mengelola perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan;
10. Melakukan urusan Perpustakaan kebijakan dibidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan bahan Perpustakaan, Bidang Layanan, Alih Media dan Informasi Perpustakaan, dan Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
11. Menyusun rencana dan penyusunan pelaksanaan fasilitasi kebijakan operasional pembangunan perpustakaan;
12. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan semua jenis perpustakaan serta pembinaan layanan informasi perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi;
13. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengolahanserta pengembangan bahan pustaka yang berbasis Teknologi Informasi;
14. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lembaga terkait dalam rangka pengembangan perpustakaan;
15. Pembinaan jabatan fungsional pustakawan dan pengembangan

sumber daya manusia;

16. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
17. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah propinsi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasn serta mencari aternatif pemecahannya;
19. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
20. Membina, membagi tugas memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. Melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota. Sejarah singkat atau Kronologis perjalanan terbentuknya Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. Kantor arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dibentuk berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan penggabungan antar Kantor Arsip, kantor Pengolahan Data Elektronik dan Bagian Perpustakaan yang melekat pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka bentuk dan struktur organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar di Perdakan ulang dengan Nomor 3 Tahun 2009 yang mana Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan data Elektronik mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung, dalam melaksanakan tugas tertentu.
 - b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, berubah menjadi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar.

- c. Peraturan Daerah Kota makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar berubah menjadi badan Arsip, Perpustakaan dan pengolahan Data Kota Makassar.
- d. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka berubah menjadi Dinas Perpustakaan dengan Type B.

2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinir, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Perpustakaan, Peraturan

Walikota Makassar Nomor 05 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dengan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

1 Kepala Dinas

Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

A. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas

pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
5. Pembinaan, pengkoordinasian, Pengolahan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dibidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan bahan Perpustakaan, Bidang Layanan, Alih Media dan Informasi Perpustakaan, dan Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
2. Menyusun rencana dan penyusunan pelaksanaan fasilitasi kebijakan operasional pembangunan perpustakaan;
3. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan semua jenis perpustakaan sesuai dengan standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat. serta meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK;
4. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan

serta pengembangan bahan pustaka yang berbasis Teknologi Informasi;

5. Penyelenggaraan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerjasama perpustakaan dan layanan terintegrasi berbasis TIK;
6. Pembinaan jabatan fungsional pustakawan dan non teknis melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional perpustakaan guna mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan guna pengembangan sumber daya manusia;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
9. Pembinaan tenaga fungsional.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi;

1. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Pengkoordinasian urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Laporan ; Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta administrasi dan akuntansi keuangan dinas. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
 - 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian; Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- 1) Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - 3) Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan,

dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;

- 4) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka, terdiri atas:

Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi, pengolahan dan perawatan bahan pustaka. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi, pengolahan dan perawatan bahan pustaka menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
 - a. Seksi Pengembangan koleksi;
Seksi pengembangan koleksi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan penganekaragaman bahan perpustakaan serta pengelolaan naskah kuno. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan koleksi

menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi
 - 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi;
 - 3) Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi;
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Koleksi;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan; Seksi Pengolahan dan Perawatan bahan perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan perawatan bahan pustaka. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengolahan dan perawatan bahanpustaka menyelenggarakan fungsinya:
- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Pengolahan dan perawatan bahan pustaka;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengolahan dan perawatan bahan pustaka;
 - 3) Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengolahan dan perawatan bahan pustaka;
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengolahan dan perawatan bahan pustaka;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

d. Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan, terdiri atas:

Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- c. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;

Seksi Layanan dan kerjasama perpustakaan mempunyai tugas melakukan Layanan dan kerjasama perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Layanan dan kerjasama perpustakaan menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- 3) Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Seksi Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;

Seksi Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- 3) Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri atas :

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- c. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.

1. Seksi Pengembangan Perpustakaan;

Seksi Pengembangan perpustakaan mempunyai tugas melakukan Pengembangan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pengembangan perpustakaan menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Perencanaan kegiatan Pengembangan Perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Perpustakaan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Pengembangan Perpustakaan;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

2. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Seksi Pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas melakukan Pembudayaan kegemaran membaca. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pembudayaan kegemaran membaca menyelenggarakan fungsinya

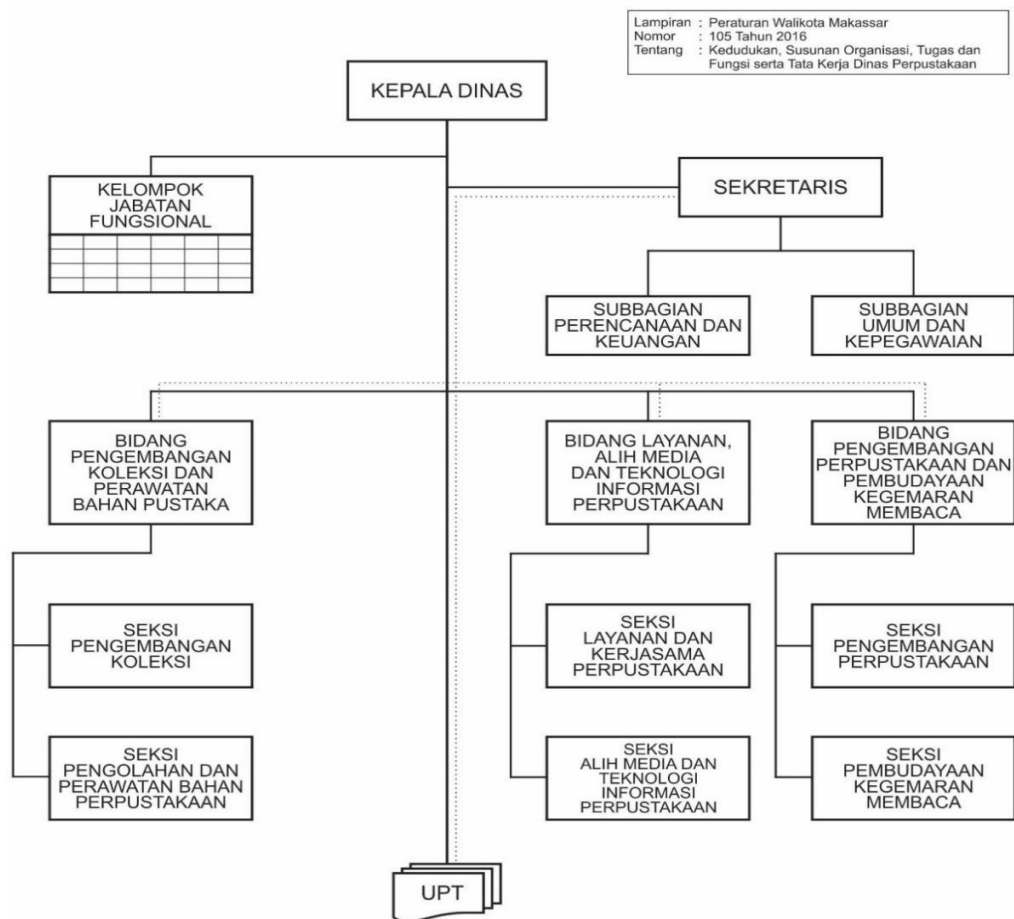
- 1) Perencanaan kegiatan Pembudayaan kegemaran membaca;
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pembudayaan kegemaran membaca;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Pembudayaan kegemaran membaca;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada lingkup dinas Perpustakaan dapat dibentuk sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber Daya Manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.3.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir bulan Tahun 2020 jumlah sumber daya manusia Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebanyak 53 orang. Kondisi sumber daya aparatur dilihat dari jumlah, status dan jenis kelamin masih sangat minim baik dari segi jumlah maupun dari

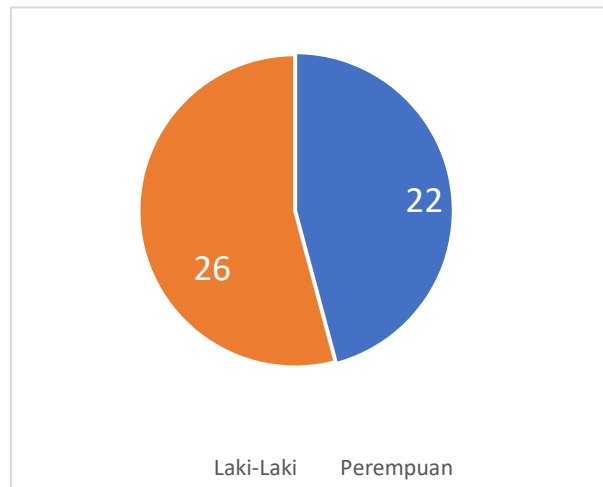
sumber daya.

Tabel 2.1 *Data Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan berdasarkan Gender/ Jenis Kelamin*

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	22 Orang
2.	Perempuan	26 Orang
Jumlah		48 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian thn. 2021(juli)

Gambar 2.1 *Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan berdasarkan Gender/ Jenis kelamin*



Dilihat dari status kepegawaiannya aparatur Dinas Perpustakaan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN (Honorar). jika melihat Gambar di atas jumlah laki-laki lebih banyak sebanyak 26 orang dan perempuan lebih sedikit dengan jumlah 22 orang.

Tabel 2.2 *Data Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Makassar berdasarkan Status Kepegawaian*

No.	Satuan Kepegawaian	L	P	Jumlah (Orang)
1.	Aparatur Sipil Negara	Orang	4 Orang	25 Orang

2.	Tenaga Non ASN (Honorer)	Orang	2 Orang	23 Orang
Jumlah		22 Orang	26 Orang	48 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Thn. 2021(juli)

Jika melihat tabel 2.2 di atas Aparat Sipil Negara sebanyak 25 orang yang terdiri dari laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah ASN perempuan 1 lebih banyak dari laki-laki. Sedangkan Tenaga Non ASN (Honorar) sebanyak 23 orang yang terdiri dari orang laki-laki dan 2 perempuan. Jika melihat data tersebut honorar perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Makassar berdasarkan Jabatan struktural

Pangkat	Pangkat		Eselon	Eselon		Fungsional	
	L	p		L	P	L	P
Pembina Utama Muda			II – b	-			6
Pembina Tingkat I			III – a		-	-	-
Pembina	4	3	III – b	2		-	-
Penata Tingkat I	2	2	IV – a	3	2	-	-
Penata	0	0	-	-	-	-	-
Penata Muda Tingkat I			-	-	-	-	-
Penata Muda	0	3	-	-	-	-	-
Pengatur			-	-	-	-	-
Pengatur Muda Tingkat I		2	-	-	-	-	-
Juru Tingkat I	0	0	-	-	-	-	-
Tenaga Kontrak		2	-	-	-	-	-
Jumlah	22	26	-	6	4	-	6

Sumber Data :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas thn. 2021(juli)

Jika melihat tabel 2.3 jumlah Pembina Utama Muda sebanyak dua orang yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Begitu juga dengan

Pembina tingkat I ada 2 orang yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Pangkat Pembina ada tujuh orang yang terdiri dari empat laki-laki dan tiga perempuan. Penata tingkat I ada 4 orang yang terdiri dari dua perempuan dan dua laki-laki. Sedangkan penata di Dinas Perpustakaan tidak ada. Untuk penata tingkat I ada dua orang yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Penata muda ada tiga orang dan

semuanya perempuan. Untuk jabatan pengatur terdiri ada 2 orang, satu perempuan dan satu laki-laki. Pengatur Muda Tingkat I ada tiga orang satu laki-laki dan 2 perempuan. Jabatan juru tingkat I tidak ada. Sedangkan tenaga honorer ada 23 orang yang terdiri dari laki-laki dan 2 perempuan. Total pegawai ASN dan Non ASN sebanyak 48 orang.

Untuk jabatan struktural eselon II ada orang perempuan. Eselon III.a ada satu laki-laki. Eselon III.b terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan eselon IV.a terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki. Ada juga data fungsional yang terdiri dari satu laki-laki dan enam perempuan. Jika dipresentasikan jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin. Ada sekitar 46 % laki-laki dan 54% perempuan di dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Dinas Perpustakaan Kota Makassar terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Strata (S) dan Strata (S2).

Tabel 2.4 *Data Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Makassar berdasarkan Pendidikan*

Jenjang Pendidikan	PNS		Tenaga Kontrak		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Program S3	0	0	0	0	0
Program S2	5	4	1	0	10
Program S	4	4	2	3	3
Program D3	0		0	0	

SMA/SMK	2	5	8	9	24
JUMLAH		4		2	48

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan pada jenjang Pendidikan program S2 ada 10 orang yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak lima orang dan tenaga honorer satu orang serta ASN perempuan sebanyak empat orang. Pada jenjang pendidikan Program S1 ada empat ASN laki-laki dan honorer dua orang serta ASN perempuan ada empat orang dan honorer tiga orang. Pada jenjang Pendidikan Program D3 ada satu orang ASN Perempuan. Untuk jenjang SMA/SMK terdiri dari dua ASN laki-laki dan Honorer laki-laki ada delapan orang serta ASN perempuan ada lima orang dan tenaga honorer sebanyak Sembilan orang. Jenjang Pendidikan cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki.

Sumber daya manusia Perpustakaan yang ada pada Dinas Perpustakaan baik kualitas maupun kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab tuntutan dan fungsi tugas, kewenangan dan tanggungjawab.

Pelayanan publik yang demokratis, berdasarkan Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 5 menjelaskan bahwa masyarakat mendapat hak yang sama dalam memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan pada semua lapisan, baik masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, perpustakaan diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Sebagai bentuk komitmen dengan mengedepankan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka Dinas Perpustakaan Kota Makassar perlu untuk menyampaikan laporan kinerja Tahun Anggaran 2020. Sumber Daya Manusia Perpustakaan yang ada pada Dinas Perpustakaan baik kualitas maupun kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab tuntutan dan fungsi tugas, kewenangan

dan tanggungjawab.

2.3.2 Kondisi Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan Kota Makassar dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang masih kurang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jika dibanding dengan cakupan wilayah pembinaan dan maupun oprasional kerjanya serta tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang perpustakaan. Untuk sarana dan prasarana yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan adalah sarana dan prasarana meliputi bangunan gedung kantor, ruang layanan dan ruang pengolahan, ruang deposit, meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Sarana dan Prasarana Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar belum mampu melaksanakan tugas pokok yang tertuang dalam program sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perpustakaan Nomor 4 tahun 1990 tentang karya cetak dan karya rekam disebabkan karena belum tersedianya ruangan khusus penyimpanan dan layanan dan ruangan pengolahan yang menunjang program-program kerja yang ada diperpustakaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standarisasi pelayanan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan nasional.

A. Sarana koleksi Perpustakaan

a. Koleksi Perpustakaan

Koleksi deposit merupakan koleksi yang terbentuk seiring terlaksananya Undang- undang Nomor 3 tahun 2018 tentang serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Koleksi deposit merupakan koleksi yang diperoleh dari perusahaan- perusahaan penerbit dan perusahaan rekaman yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya ke perpustakaan. Koleksi Deposit lebih condong kepada koleksi yang bersifat local atau kedaerahan, walaupun substansi koleksi terbitanya juga bersifat

umum.

b. Karya Cetak

Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

c. Karya Rekam

Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

d. Koleksi Anak-Anak

Koleksi anak-anak adalah bahan bacaan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai dengan 2 tahun yang isinya dapat menambah pengetahuan, daya imajinasi dan memberikan kegembiraan ekspresi sesuai dengan tingkatan palaran dan perkembangan jiwa anak seusia tersebut.

e. Koleksi Referensi

Koleksi referensi merupakan koleksi yang memberikan informasi singkat tentang kata, subyek, data, ukuran, nama orang, waktu dan lain sebagainya. Jenis Koleksi ini tidak untuk dibaca secara keseluruhan sebagaimana buku tulisan biasa. Penyusunannya digunakan aturan tertentu biasanya berdasarkan abjad sebut atau kronologis.

f. Koleksi Koran

Koleksi koran sering juga disebut sebagai koleksi surat kabar, adalah terbitan setiap hari yang memuat berbagai hal kejadian terkini yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Bentuknya lebar dan dari bahan kertas.

g. Koleksi Majalah

Koleksi majalah adalah terbitan yang terbit secara berkala yang memuat atau membahas suatu hal yang spesifik yang

diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

h. Koleksi Langka

Koleksi langka merupakan himpunan bahan pustaka yang sudah tidak ada di pasaran, karena sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbitnya ataupun penerbitnya sudah tidak ada.

i. Koleksi Naskah Kuno

Koleksi naskah kuno merupakan himpunan bahan pustaka yang berusia 50 tahun atau lebih yang mempunyai nilai historis, maupun nilai universal dalam kategori isinya.

B. Jenis dan jumlah fasilitas/sarana informasi

Tabel 2.5 Kondisi Jenis dan Jumlah Fasilitas Sarana Informasi

NO	Jenis fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Papan Pengumuman	buah	Kondisi baik
2.	Kotak Saran	2 Buah	Kondisi Baik
3.	Jenis Bahan Promosi	5 buah	Kondisi baik
4.	Peralatan jaringan Komputer (Acces Point)	2 buah	Kondisi baik
5.	Website	buah	Kondisi baik
6	E-mail	buah	Kondisi baik
7.	Call center	buah	Kondisi baik
8.	Facebook	buah	Kondisi baik
9.	Media Center	-	Kondisi baik
10.	Whatsapp	buah	Kondisi baik
11	Twitter	buah	Kondisi baik
12.	Instagram	I buah	Kondisi baik

Tabel 2.6 Data Asset Dinas Perpustakaan Kota Makassar berdasarkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Jenis Sarana Informasi

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Merk/Tipe	Ukuran/CC	Bahan	Tahun	Asal Usul	Jumlah	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
791											4,019,787,300
1	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	000006	Daihatsu Grand New Xenia R AT 1,3 DLX Vin 2019		Besi	2019	Pembelian	1	212,893,000	Perlengkapan
2	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon/Mobil	000001	Daihatsu			2011	Pembelian	1	154,700,000	ARSIP MOBIL 0678/NO MUTASI 074*/BAST/BMD/BPKAD/X/2019
3	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	000005	TOYOTA	ALL NEW KIJANG INOVA	Besi	2017	BELANJA MODAL	1	420,760,000	Mutasi Dari Perlengkapan untuk Kadis Perpustakaan Andi Siswanta/NO ARSIP 1112
4	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon/Mobil Perpustakaan Keliling	000004	Toyota HILUX	Bus Mini	Besi	2016	HIBAH	1	308,100,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
5	1.3.2.02.01.01.006	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	000002	Daihatsu Great new xenia R AT	Mobil	Besi	2018	Pembelian	1	211,850,000	PERLENGKAPAN/NO ARSIP 1245
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000008	Shogun		Besi	2007	APBD	1	13,750,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 1253
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000018	Zusuki	Bebek	Besi	2015		1	12,735,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000010	Shogun		Besi	2007	APBD	1	13,750,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 1221
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000002	Suzuki Bebek	Smash	Besi	2004	APBD	1	10,100,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 1213
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000014	Suzuki		Besi	2011	Perlengkapan	1	11,750,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 1251
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/Sepeda Motor	000006	Shogun		Besi	2006	APBD	1	12,336,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 1248
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor/SUZUKI SMASH	000009	SUZUKI SMASH	FD 110 XCD	Besi	2013	Pembelian	1	9,870,000	Mutasi dari Bagian Humas
13	1.3.2.02.01.06.008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling/Mobil Perpustakaan	000001	Toyota kijang (putih)	Bus Mini	Besi	2006	Bantuan Perpus RI	1	130,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB NO ARSIP 0675
14	1.3.2.02.01.06.008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling/Mobil Perpustakaan	000002	Toyota kijang (biru)	Bus Mini	Besi	2006	Bantuan Perpus RI	1	130,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP / BPKB 0676
15	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001				2017	BELANJA MODAL	1	3,100,000	Perlengkapan
16	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000015	BRODER	B-203	Fiber	2017	Pembelian	1	2,600,000	Mutasi dari Perlengkapan
17	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000013-000014	Star AJ 301	Aj 301	Melamin	2017	Pembelian	2	5,950,000	Mutasi Perlengkapan

18	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000016	Star	Aj 303		2016	Pembelian	1	2,900,000	Mutasi Arsip
19	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal/Lemari	000017	Tiger		Besi	2019	Pembelian	1	3,199,700	Bagian perlengkapan
20	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000005	Brother	B-203	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	2,600,000	Mutasi Dari Perlengkapan Perlengkapan
21	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000010-000011	Broder	B-203	Besi	2017	BELANJA MODAL	2	5,200,000	Mutasi dari Perlengkapan
22	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu/Lemari rak buku	000001	Lokal	Lemari rak buku	Kayu	2015	Hibah/Sumbangan	1	1,225,000	Hibah dari yayasan Bakti
23	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/LEMARI RAK 2 SISI	000102-000114	-		Kayu	2014	Belanja Modal	7	12,558,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
24	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 2 Sisi	000006-000010	-		Kayu	2012	BM	5	10,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
25	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 1 Sisi	000011-000017			Kayu	2013	pembelian	7	12,600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
26	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/rak buku Information Kiosk	000099-000100	lokal	rak buku Information Kiosk	Kayu	2005	Hibah/Sumbangan	2	1,800,000	hibah dari yayasan bakti
27	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak Kayu	000025-000125	RAK 1 SISI		Kayu	2015	PEMBELIAN	19	37,620,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
28	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 2 sisi	000075-000094	-	-	Kayu	2016	BELANJA MODAL	20	49,800,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
29	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 1 Sisi	000001-000005	-		Kayu	2012	BM	5	10,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
30	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/rak buku bookshelf	000097-000098	lokal	rak buku bookshelf	Kayu	2005	Hibah/Sumbangan	2	1,800,000	hibah dari yayasan bakti
31	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 1 sisi	000055-000074	-	-	Kayu	2016	BELANJA MODAL	20	39,800,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
32	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/RAK 2 SISI	000035-000054			Kayu	2015	PEMBELIAN	20	49,600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
33	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/LEMARI RAK 1 SISI	000103-000115	-		Kayu	2014	Belanja Modal	7	12,558,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
34	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/rak kayu Bookshelf	000101	lokal	rak kayu Bookshelf	Kayu	2005	Hibah/Sumbangan	1	900,000	hibah dari yayasan bakti
35	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak 2 Sisi	000018-000024			Kayu	2013	pembelian	7	12,600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
36	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000007	Brother B 103	Kotak Besi	Besi	2018	Pembelian	1	2,075,000	PERLENGKAPAN
37	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000008-000009	Tiger		Besi	2019	Pembelian	2	4,999,400	Bagian Perlengkapan
38	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000003-000004	BROTHER B-1	METAL UK 103.5X45.5X 62 CM	Besi	2017	BELANJA MODAL	2	4,300,000	PERLENGKAPAN
39	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000005	Brother B 103	103	Besi	2018	Pembelian	1	2,075,000	Mutasi dari perlengkapan
40	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca/Lemari kaca Dorong	000001			Aluminium	2000	Pembelian	1	600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
41	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca/Lemari kaca Dorong	000002-000006			Aluminium	2000	APBD	5	3,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
42	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	000008	Infoma	INF 1214901	Kayu	2018	BELANJA MODAL	1	7,400,000	

43	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca/Lemari kaca Dorong	000007			Aluminium	2004	APBD	1	1,600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
44	1.3.2.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor lain- lain	000017	Lokal	Besi Kotak	Kayu	2018	Pembelian	1	4,355,000	mutasi dari Perlengkapan
45	1.3.2.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor lain- lain	000018	Lokal	Besi Kotak	Kayu	2018	Pembelian	1	4,355,000	MUTASI DARI PERLENGKAPAN
46	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama/Papan nama TBK	000001-000040	-	-	Besi	2016	BELANJA MODAL	39	28,860,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
47	1.3.2.05.01.05.019	Alat Pemotong Kertas	000001	Origin Card Cutter	OCC-55PVC	Melamin	2018	Pembelian	1	1,485,000	Perpustakaan
48	1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	000001	EPSON	LUMENS HDMI	Melamin	2019	Pembelian	1	6,710,000	Belanja Modal Dipust
49	1.3.2.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000001	Mesin laminatingTa runa Jaya	Taruna Jaya	Besi	2018	Pembelian	1	1,490,000	PEMBELIAN
50	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu/Meja komputer	000001-000002	Lokal	Meja Panjang	Kayu	2020	Hibah/Sumbangan	2	21,087,500	Hibah dari Yayasan Bakti
51	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/Kursi Kayu / Rotan / Bambu	000365-000444	Kursi Baca		Kayu	2015	PEMBELIAN	80	55,760,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
52	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/Kursi Baca untuk TBK	000325-000344			Kayu	2013	pembelian	20	14,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
53	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/Kursi TK	000445-000464	-	-	Kayu	2016	BELANJA MODAL	19	5,700,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
54	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/KURSI BACA	000345-000364	-		Kayu	2014	Belanja Modal	20	13,900,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
55	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/Kursi baca untuk TBK	000305-000324	-		Kayu	2012	BM	20	9,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
56	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	000001			Kayu	2019	Pembelian	1	9,299,000	MUTASI DARI PERLENGKAPAN
57	1.3.2.05.02.01.011	Meja Ketik/Meja Baca TK	000021-000040	-	-	Kayu	2016	BELANJA MODAL	20	10,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
58	1.3.2.05.02.01.011	Meja Ketik/Meja Tulis	000001-000020	Meja Baca	-	Kayu	2015	PEMBELIAN	20	41,940,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
59	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro/MEJA KERJA 1/2 BIRO	000024	-		Kayu	2014	Perlengkap n	1	2,837,500	MUTASI DARI DINAS ARSIP
60	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	000011-000012	FUTURA		Besi	2017	BELANJA MODAL	2	1,078,000	PERLENGKAPAN
61	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	000003-000010	Futura	SPK 31	Campuran	2017	BELANJA MODAL	8	4,312,000	Mutasi dari Perlengkapan
62	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	000013-000042	Fonte bangles	stel 1-2	Kain	2019	Pembelian	30	22,425,000	Belanja Modal
63	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	informa sofa new paulo	1-2	Kain	2019	Pembelian	1	13,997,000	Ruangan Perpustakaan Umum
64	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	000002	informa sofa new paulo	1-2	Campuran	2019	Pembelian	1	13,997,000	Ruangan Perpustakaan Umum
65	1.3.2.05.02.01.054	Meja Biro/Meja Biro	000029-000038	Meja 1/2 Biro	-	Kayu	2015	PEMBELIAN	10	9,960,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
66	1.3.2.05.02.01.055	Meubelair Lainnya/Rak Buku	000042-000053	-		Kayu	2009	Pembelian	12	18,225,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
67	1.3.2.05.02.01.055	Meubelair Lainnya/Rak Buku	000012-000027			Besi	2001	APBD	16	4,800,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
68	1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Sanyo	SR-D50 I PI	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	2,010,000	Mutasi dari Perlengkapan

69	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	000010	Polytron	AC 1.5 PK Low Watt	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	4,900,000	belanja Modal Dinas perpustakaan
70	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	000007	PANASONIC		Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	8,650,000	PERLENGKAPAN
71	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	000005-000006	Panasonic	Split	Besi	2016	BELANJA MODAL	2	9,960,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
72	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	000009	Polytron	AC 1.5 PK Low Watt	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	4,900,000	untuk ruangan Bidang Dinas perpustakaan
73	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	000008	Polytron	AC 1.5 PK Low Watt	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	4,900,000	Belanja Modal Dinas perpustakaan
74	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	000010	Miyako wall fan KBD	Kipas Angin	Fiber	2019	Pembelian	1	730,250	Perpustakaan Umum
75	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	000011-000019	Miyako	kbd	Besi	2019	Pembelian	9	6,572,250	Belanja Modal Dipust
76	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	000003	Samsung Flat Smart	32 Inch	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	4,299,100	Perpustakaan
77	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	000002	Samsung Flat Smart	32 Inch	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	4,299,100	Belanja Modal Perpustakaan
78	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	000001-000004	ASATRON	HT-8881 UKM	Melamin	2018	BELANJA MODAL	4	12,400,000	Untuk Mobil perpustakaan keliling dan Kegiatan Perpustakaan
79	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	000021	Yamaha	power Mixer 16 Channel	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	26,960,000	Belanja Modal Dinas perpustakaan
80	1.3.2.05.02.06.023	Tustel	000001-000004	CANON	SX 430 GT	Tembaga	2019	Pembelian	4	17,360,000	BELANJA MODAL
81	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	000002	ROYAL	RCQ 315	Besi	2017	BELANJA MODAL	1	2,815,000	PERLENGKAPAN
82	1.3.2.05.02.06.057	Karpet	000001	KRF 1788N	Karpet	Kain	2019	Pembelian	1	6,900,000	Belanja Modal Perpustakaan
83	1.3.2.05.02.06.087	Rak Televisi	000001	Samsung	Full HD Flat TV UA49K100	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	7,845,000	TELEVISI 50 INCI Mutasi dari Perlengkapan
84	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001-000003	INFORMA	SM21714LXM EJA SAMPING	Kayu	2017	BELANJA MODAL	3	16,770,000	PERLENGKAPAN
85	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/Meja Pimpinan 1 Biro	000002-000003	-	-	Kayu + Kaca	2015	Belanja Modal	2	4,500,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
86	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000004	Lokal	Kayu	Kayu	2018	Pembelian	1	2,880,000	MUTASI DARI PERLENGKAPAN
87	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000005	Lokal	Kotak	Kayu	2018	Pembelian	1	2,880,000	PERLENGKAPAN
88	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001-000005	Finising Duco Melamin	SPK 39	Kayu	2017	BELANJA MODAL	5	9,450,000	Mutasi dari Perlengkapan
89	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja	000001-000008	INDACHI	D-810U OSKAR	Karet	2017	BELANJA MODAL	7	10,325,000	Perlengkapan
90	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja/Kursi Pimpinan	000002	Chairman		Besi	2013	pembelian	1	2,450,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
91	1.3.2.05.03.03.010	Kursi Pimpinan	000006	Ullis			2016	Pembelian	1	5,500,000	Mutasi Arsip
92	1.3.2.05.03.03.010	Kursi Pimpinan	000005	Charmani			2016	Pembelian	1	2,760,000	Mutasi Arsip
93	1.3.2.05.03.03.010	Kursi Pimpinan	000001-000004	CHAIRMAN	EC 500	KULIT	2017	BELANJA MODAL	4	9,500,000	PERLENGKAPAN
94	1.3.2.05.03.03.010	Kursi Pimpinan/Kursi Pimpinan	000007-000008	Chairman		Besi	2019	Pembelian	2	5,417,600	Bagian Perlengkapan

95	1.3.2.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan/RAK BUKU DUJ SISI	000011-000020			Kayu	2017	BELANJA MODAL	10	23,000,000	Rak TBK
96	1.3.2.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan/rak Bukusatu sisi	000006			Kayu	2017	BELANJA MODAL	1	1,800,000	untuk TBK
97	1.3.2.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan/rak Buku satu sisi	000001-000010			Kayu	2017	BELANJA MODAL	9	16,200,000	untuk TBK
98	1.3.2.06.01.02.057	Slide Projector	000002	Screen Pro	Gantung	Plastik	2016	BELANJA MODAL	1	7,500,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
99	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	000001	NIKKON	Kamera DSLR	Tembaga	2018	BELANJA MODAL	1	8,800,000	Untuk Kegiatan Dinas perpustakaan
100	1.3.2.08.01.41.249	Stabilizer/UPS	000002-000005	PROLTNK	12V/9AH	Melamin	2019	Pembelian	4	7,982,000	BELANJA MODAL DIPUS
101	1.3.2.08.01.41.249	Stabilizer/UPS	000001	ICA	1200 VA	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	1,200,000	
102	1.3.2.08.01.41.249	Stabilizer/UPS	000006	PROLTNK	12V/9AH	Melamin	2019	Pembelian	1	1,995,500	Belanja Modal Dipust
103	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja/Meja Baca untuk TBK	000058-000061			Kayu	2013	pembelian	4	9,200,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
104	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja	000004	Lokal	Segi Emat	Kayu	2018	Pembelian	1	1,930,000	Perlengkapan
105	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja/Meja baca untuk TBK	000054-000057	-		Kayu	2012	BM	4	7,200,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
106	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja	000003	Lokal	Segi Empat	Kayu	2018	Pembelian	1	1,930,000	Perlengkapan
107	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja	000001-000002				2017	BELANJA MODAL	2	5,200,000	Mutasi Perlengkapan
108	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja/MEJA BACA	000062-000065	-		Kayu	2014	Belanja Modal	4	9,184,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
109	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja	000005	Lokal	Segi empat	Kayu	2018	Pembelian	1	1,930,000	Perlengkapan
110	1.3.2.08.01.56.081	Meja Kerja/Meja Baca	000030-000041	-		Kayu	2009	Pembelian	12	12,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
111	1.3.2.08.04.02.039	Serial Scanner/Printer	000001	Panasonic Document Scanner	KV S 5046H	Fiber	2018	BELANJA MODAL	1	47,500,000	Perpustakaan
112	1.3.2.10.01.01.008	Komputer Jaringan Lainnya/Komputer mainframe/server	000001	Lenovo		Besi	2020	Pembelian	1	113,500,400	Belanja Modal Dinas Perpustakaan
113	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000073	LENOVO	FODTOOOGI D	Fiber	2019	Pembelian	1	11,800,000	Belanja Modal dipus
114	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000072	LENOVO	FODTOOOGI D	Fiber	2019	Pembelian	1	11,800,000	Belanja Modal DIPUS
115	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000084-000088	LENOVO		Fiber	2019	Pembelian	5	55,000,000	BM DIPUS
116	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit/All In One	000052-000071	Lenovo	C20-30	Plastik	2016	BELANJA MODAL	20	149,200,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
117	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit/Komputer PC	000012-000015	Lenovo A58e		Fiber	2012	Hibah	4	240,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
118	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000074-000082	LENOVO	FODTOOOGI D	Fiber	2019	Pembelian	9	106,200,000	Belanja Modal Dipus
119	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000089-000090	ASUS	PKM0047595 61	Besi	2019	Pembelian	2	19,200,000	Belanja Modal
120	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit/PC Unit	000027-000045	Lenovo	90B9 Core i3	Campuran	2015	PEMBELIAN	19	141,797,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP

121	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	000083	LENOVO	FODTOOOGI D	Fiber	2019	Pembelian	1	11,800,000	belanja Modal Dipus
122	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit/KOMPUTER ALL IN ONE	000018-000019	Lenovo ThinkCentre	ALL IN ONE	Fiber	2014	Belanja Modal	2	24,980,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
123	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	000003	Lenovo	Core i7,14	Melamin	2019	Pembelian	1	14,500,000	Belanja Modal Dipust
124	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	000004	LenovoV330	Note book i7,8,GB,IT,AM D	Besi	2018	BELANJA MODAL	1	13,936,500	Untuk keperluan Dinas Perpustakaan
125	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	000002	Lenovo V330	i7,8GB,1 TB,AMD 14 in	Fiber	2018	Pembelian	1	13,936,500	untuk keperluan Penginputan data
126	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	000001	LENOVO	ip330-151ch	Fiber	2019	Pembelian	1	14,900,000	Belanja Modal Dinas PERPUSTAKAAN
127	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	000002	LENOVO	ip330-15ich	Fiber	2019	Pembelian	1	14,900,000	Belanja modal dinas PERPUSTAKAAN
128	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	000002-000008	Lenovo All in one	All in one	Fiber	2017	BELANJA MODAL	7	67,760,000	Perpustakaan Umum
129	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible/Biaya Hardware Computer PC All IN one & Instalasi Aplikasi	000010	Lenovo	Idencentre A	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	10,000,000	
130	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible/Komputer	000001	Lenovo All in one	All in one	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	9,680,000	Perpustakaan Umum
131	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	000009	Lenovo	All on One ede	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	18,425,000	
132	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)/Desktop Acer Aspire M5630	000002-000004	Acer Aspire		Fiber	2007	Hibah/Sumbangan	3	36,450,000	Hibah dari Yayasan Bakti
133	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001	lenovo ALL IN ONE	AIO 520-271CBi7	Fiber	2019	Pembelian	1	25,750,000	Belanja Modal
134	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000062	epson	LQ2190	Besi	2017	BELANJA MODAL	1	8,560,000	Mutasi dari Perlengkapan
135	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006-000014	EPSON	L5190	Melamin	2019	Pembelian	9	40,500,000	BELANJA MODAL DIPUS
136	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	000015-000064	Epson L-120	L-120 Inkjet	Campuran	2015	PEMBELIAN	19	47,310,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
137	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000063	HP Laser Jet	pro M102a	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	1,700,000	BM Perpustakaan

138	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000057	printer Laser Jet HP L Jet Pro	MFP M130a	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	2,000,000	PEMBELIAN
139	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000056	printer Laser Jet HP L Jet Pro	MFP M130a	Fiber	2017	BELANJA MODAL	1	2,000,000	BELANJA MODAL DINAS PERPUSTAKAAN
140	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Injek/Tinta Warna	000034-000055	Epson L-120	Injek	Plastik	2016	BELANJA MODAL	22	54,560,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
141	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001-000003	printer inkjet epson printer	L360	Fiber	2017	BELANJA MODAL	3	6,900,000	
142	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000058-000061	Epson	L565 Wif All in One	Campuran	2019	Pembelian	4	16,800,000	Belanja Modal
143	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)/POTABLE SCANNER	000003	AlfaLink		Fiber	2014	BM-P	1	2,970,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
144	1.3.2.10.02.04.002	Router/Modem HSDPA	000049-000068	Huawei		Plastik	2016	BELANJA MODAL	20	29,600,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
145	1.3.2.10.02.04.002	Router/Router	000029-000048	Huawei B970	Modem Router	Fiber	2015	PEMBELIAN	20	41,500,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
146	1.3.2.10.02.04.034	Peralatan Jaringan/Access Point	000005	TP-LINK		Plastik	2016	BELANJA MODAL	1	760,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
6											5,920,000
4											3,180,000
147	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu/Rak Kayu	000034	RAK 1 SISI		Kayu	2015	PEMBELIAN	1	1,980,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
148	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu/Kursi TK	000455	-	-	Kayu	2016	BELANJA MODAL	1	300,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
149	1.3.2.05.02.01.054	Meja Biro/Meja Biro	000005-000006			Kayu	2001	APBD	2	900,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
2											2,740,000
150	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama/Papan nama TBK	000021	-	-	Besi	2016	BELANJA MODAL	1	740,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
151	1.3.2.09.04.02.031	Kamera Digital/Kamera Digital	000001	Sony		Besi	2012	BM	1	2,000,000	MUTASI DARI DINAS ARSIP
797											4,025,707,300

Peralatan dan perlengkapan Dinas Perpustakaan Kota Makassar tersebut di atas menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

2.4 Kinerja pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, didalam pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan Dinas Perpustakaan merupakan urusan wajib tidak berkaitan pelayanan Dasar namun sampai saat ini belum ada indikator urusan perpustakaan yang ditetapkan dalam bentuk SPM.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selain melaksanakan tugas administrasi perkantoran, Dinas Perpustakaan Kota Makassar juga dapat memberikan layanan lain seperti, Layanan Perpustakaan keliling, (Dongeng Keliling), Layanan Dongkelor (dongeng Keliling lewat Online), Layanan Membaca, E-pustaka, Pembinaan Perpustakaan, Sentuh Pustaka dan Magang Mandiri yang bermuara ke Inklusi Sosial. Dinas Perpustakaan Kota Makassar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung proses pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan perpustakaan yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah kota Makassar sebagai wahana belajar masyarakat

sepanjang hayat. Dinas Perpustakaan Kota Makassar di dalam mendukung dan menyukseskan GMGM sebagai program unggulan Walikota Makassar yang dicanangkan pada tanggal 5 Juni 2005 terus berupaya mensosialisasikan budaya membaca ditengah-tengah masyarakat dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan umum, taman baca, perpustakaan keliling, pembinaan berbagai jenis perpustakaan, dan kegiatan rutin minat baca yang dilaksanakan setiap tahunnya disambut apresiasi luar biasa oleh masyarakat.

Ditengah keterbatasan sarana dan prasarana yakni salah satunya belum memiliki Gedung Perpustakaan tersendiri. Namun selama 4 tahun tetap berkarya, Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah mempersembahkan 6 inovasi. Salah satunya lahir ditengah Pandemi Covid19 dan sebagai perluasan layanan Inovasi sebelumnya 5 dari 6 inovasi telah diakui dan mendapat penghargaan baik lingkup Kota, Provinsi dan Nasional. 5 Inovasi tersebut menerima penghargaan berturut-turut setiap tahun adalah

1. Dongkel with Mobile Library (99 Top Inovasi Layanan Publik Tingkat Nasional dari Kemenpan RB Tahun 2017
2. Kartu Perpustakaan Bisa PeDe (20 TOP Inovasi Layanan Publik Tingkat Provinsi dari Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018
3. Layanan Khusus atau kelas Khusus Pemustaka, 10 Layanan inklusi sosial terbaik dalam Lomba Banner Tingkat Nasional dari Kepala Perpustakaan Nasional RI tahun 2019.
4. Sentuh Pustaka, Juara I Lomba Inovasi Daerah Innovative Major Award Tingkat Kota Makassar dari Walikota Makassar Tahun 2019.
5. DONGKOLER atau Dongeng Keliling Online dari Rumah. Mendapatkan Top 2 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-9 dari Kemenpan-RB Tahun 2020.
6. Sentuh Pustaka menjadi Juara Top 45 oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021
7. Sentuh Pustaka menjadi Juara Top 30 tingkat Pemprov Sulsel Tahun 2021

Dalam hal pelayanan di bidang perpustakaan capaian kinerja sasaran meningkatnya pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan umum di bidang perpustakaan serta pemasyarakatan minat baca telah mencapai target maksimal sebesar 100 %. Dari 5 target kinerja yang ditetapkan 7 indikator program dan 3 Program Utama telah mencapai target yang diharapkan yaitu persentase jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dan taman baca, persentase jumlah pengunjung usia sekolah ke Perpustakaan dan taman baca kecamatan dan persentase jumlah pengelola Perpustakaan/Taman Baca yang telah dibina.

Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan dan taman baca kecamatan dimasa pandemik mengalami penurunan karena adanya pandemik karena orientasi dan sasaran ke usia sekolah dan masyarakat, serta persentase jumlah koleksi buku yang sudah dialih mediakan ke digital belum terlaksana karena belum adanya sarana dan alat untuk mendukung kegiatan tersebut. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target khususnya jumlah pengunjung dikarenakan adanya bencana Nasional atau pandemik

covid-9. Untuk alih media belum dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran.

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Pengunjung		Nilai tingkat kegemaran membaca	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	398.000.	470.000	590.000	640.000	480.000	439.658	576.099	60.957	668.79	86.527	42,56 %	,5 %	4 %	8,06 %	22,20 %	
2	Jumlah Koleksi buku		Nilai tingkat kegemaran membaca				2850	2850	2850	2850	32.447	33.668	5022	5,72 %	46,26	-	40 %	,762 %	7,045	8
3	Prosentase Koleksi Naskah Kuno yang Digitalisasi		Indeks Pembangunan Literasi Baca			40 %	40 %	50	50	50	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Kenaikan Jumlah Koleksi buku		Nilai tingkat kegemaran membaca			-	-	-	-	55 %	-	-	-	-	46,26 %	-	-	-	-	84 %
5	Persentase perawatan koleksi dan Bahan Pustaka		Nilai tingkat kegemaran membaca			-	-	-	-	35 %	-	-	-	-	26,82	-	-	-	-	76,6 %
6	Prosentase Taman Baca yang dikembangkan		Nilai tingkat kegemaran membaca			45	58,82 %	65	65,36 %	70			3,5	32,54 %	32,53%			22,96 %	49,7 %	48,4
7	Presentase Peningkatan Budaya Baca		Nilai tingkat kegemaran membaca			45 %	55 %	56 %	60 %	47 %				80,25	44,8 %					95,34
8	Cakupan Perpustakaan yang dikelola		Nilai tingkat kegemaran			45 %	55 %	58 %	64 %	-			3,5 %	84,23 %	-			23,30 %	3,04 %	-

			n membaca																
9	Persentase Kenaikan Jumlah Perpustakaan		Nilai tingkat kegemaran membaca					35%					9,5 %					2,7 %	
10	Jumlah Tenaga Perpustakaan		Nilai tingkat kegemaran membaca		3	5	5	5	7	3	5	5	5	7	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.14
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	7.740.320.650	7.323.46.000	8.562.973.000	9.020.407.000	6.839.693.420	31.724.902.599	7.934.330.417.000	14.189.237.210	96,93	94,04	95,13	84,10	- 2.464.138.000	- 2.893.561.138			
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.860.461.000	1.860.461.000	2.364.885.000	4.630.407.000	11.510.061.550	3.040.814.088	1.844.7397.787	5.526.282.450	98,23	92,35	91,95	87,16	- 1.093.899.400	- 1.232.900.938			
Belanja Pegawai	1.860.461.000	1.860.461.000	1.946.137.000	4.630.407.000	11.510.061.550	3.040.814.088	3.138.117.422	5.526.282.450	98,23	92,35	91,95	87,16	- 1.093.899.400	- 1.232.900.938			
II. BELANJA LANGSUNG	5.463.000	5.463.000	4.369.102.000	14.390.000.000	20.423.583.748	28.684.088.511	23.289.652.381	8.662.954.760	96,21	94,22	95,57	82,26	- 1.370.238.600	- 1.606.660.199			
Belanja Barang dan jasa	4.339.175.000	4.339.175.000	20.093.972.000	3.542.840.937	15.512.148.868	23.938.345.611	19.199.157.281	7.934.670.760	95,74	95,61	95,55	82,21	- 635.386.400	- 849.131.319			
Belanja Modal -	291.500.000	291.500.000	999.480.000	10.847.159.063	905.159.880	526.217.900	973.195.100	671.044.000	97,69	86,91	97,37	84,98	- 1.350.048.000	- 84.216.880			

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.51. Tantangan

Keberadaan Dinas Perpustakaan setingkat dengan SKPD lainnya di jajaran pemerintahan Kota Makassar keberadaannya tidak lepas dari beban moral amanat dan tugas negara, dengan adanya pemerintah dari terbitnya perda Nomor 08 tahun 2018 tentang pemebentukan Dinas Perpustakaan sangat relevan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Pryanto (2016) maka analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Dinas Perpustakaan Kota Makassar dapat disarikan sebagai berikut:

- A. Kekuatan (Strength) Pengembangan Layanan Perpustakaan adalah :
1. Ada Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan
 2. Jumlah perpustakaan yang dimiliki Dinas Perpustakaan
 3. Jumlah tenaga Pustakawan
 4. Jumlah Koleksi Buku
 5. Jumlah Relawan Baca
 6. Jumlah Pendongeng
 7. Jumlah Penggiat Literasi
 8. Jumlah Penerbit, Toko Buku dan Lembaga Kursus yang telah MOU dengan Dinas Perpustakaan
 9. Jumlah Perpustakaan Keliling (Pusling)
 10. Jumlah perpustakaan sekolah sebanyak 826 perpustakaan yang sudah bina sebanyak 500 perpustakaan sekolah SD dan SMP (Negeri dan Swasta)
 11. yang telah terakreditasi sebanyak 9 perpustakaan sekolah
 12. Perpustakaan Jumlah perpustakaan ditingkat Kecamatan, kelurahan dan kepulauan yang menjadi binaan.
 13. Adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan jurusan perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dalam hal penyediaan sarana magang akan membawa dampak pada

sistem layanan perpustakaan

14. Akan dibangunnya gedung layanan perpustakaan yang sesuai standar layanan Nasional.
- B. Kelemahan (Weaknees) Pelayanan Perpustakaan adalah :
1. Jumlah tenaga pustakawan yang tersedia hanya 7 orang sedangkan kebutuhan tenaga pustakawan sebanyak 99 berdasarkan rasio jumlah penduduk.
 2. Belum tersedianya ruangan yang presentatif untuk layanan, pengolahan dan Deposit (belum ada Gedung Layanan Perpustakaan yang sesuai standar Perpustakaan).
 3. Belum ada gambaran dan ketersediaan peta kualitas perpustakaan di Kota Makassar
 4. Belum adanya layanan perpustakaan yang sesuai standar Perpustakaan Internasional
 5. Fakta masih rendahnya minat masyarakat dan berkunjung keperpustakaan jika diukur dari rasio penduduk dengan kunjungan ketempat lainnya artinya perpustakaan bukan salah satu prioritas kunjungan
 6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia perpustakaan
 7. Belum terciptanya jejaring dan kerjasama layanan perpustakaan terutama perpustakaan Perguruan Tinggi (Layanan Perpustakaan dari segi koleksi belum konek)
- C. Peluang (Opportunity)
1. Tumbuh kembangnya signifikan lembaga pendidikan profesi khusus tenaga perpustakaan
 2. Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas / jurusan perpustakaan
 3. Banyaknya pemuda dan pelajar dan dari daerah lain yang menjadikan kota makassar tempat melanjutkan studynya
 4. Jumlah sebanyak 1.423.877 penduduk Kota Makassar
 5. Perpustakaan Kota Makassar menjadi rujukan dan sasaran studi tiru dari seluruh Indonesia

6. Tersedianya Dana CSR perusahaan (BUMN dan BUMD) untuk pengembangan Pendidikan dibidang perpustakaan
7. Media massa juga mengembangkan isu budaya baca di masyarakat
8. Adanya program pengadaan buku baik di tingkat provinsi maupun nasional
9. Adanya donasi buku dari masyarakat (termasuk naskah kuno)
10. Adanya Lembaga mitra pembangunan yang juga memproduksi buku

D. Tantangan (Threats) Perpustakaan adalah :

1. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan
2. Isu perpustakaan belum menjadi isu (lintas sektor & aktor)
3. Masih kurangnya formasi bagi alumni jurusan perpustakaan untuk direkrut menjadi ASN
4. Masih rendahnya indeks budaya baca masyarakat
5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Keberadaan lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan, sumber referensi, Informasi dan penelitian.

Sejajar dengan pemetaan analisis SWOT diatas dinas Perpustakaan di dalam Renstra 2021-2026 mengeluarkan analisis yang kurang lebih sama pada setiap bagian. Dari kesejajaran analisis tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi prioritas, yaitu fungsi dan peran Dinas Perpustakaan Kota Makassar selaku instansi selalu melekat pada citra Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya bisa jadi sebuah peluang, namun otomatis akan menjadi hambatan tersendiri jika suatu ketika Makassar sebagai Brand mengalami fase perkembangan yang tidak lagi sejajar dengan visi misi pendidikan seperti pada visi penyokong generasi pembelajar. Kedua, terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi peluang. Jika kemudian indeks capaian kinerja lembaga perpustakaan selalu dilihat dalam konteks manifest angka

kunjungan ke perpustakaan secara angka, maka sifat non fisik yang melekat pada capaian logika teknologi informasi dan komunikasi akan memiliki prinsip yang berbeda. Kunjungan dalam logika IT berarti frekuensi kunjungan *klik like*, frekuensi *share* dan *subscribe*, serta beragam bahasa asosiasi IT lainnya. Sayangnya tuntutan pada pustakawan selaku pemegang kepentingan institusi justru tidak sejajar dengan logika penggunaan prinsip IT itu tadi. Solusi atas hal tersebut adanya penyesuaian regulasi tuntutan Indeks Kinerja Utama (IKU). Justru dititik inilah kuatnya dukungan Pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan akan tuntutan pembuktian. Seberapa jauh regulasi bisa disesuaikan dengan kenyataan dilapangan sesuai era dan tuntutan zaman.

Tabel 2.15 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulsel

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar	Sasaran Renstra Provinsi Sul-Sel	Sasaran Renstra Perpustakaan RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Budaya Baca	Meningkatnya minat baca	Meningkatnya Minat Baca	Menurunnya Angka Melek Huruf
2	Jumlah Pengunjung	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca	
3	Jumlah Koleksi Judul yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Meningkatnya Jumlah Koleksi	Meningkatnya Jumlah Koleksi	
4	Jumlah Pustakawan tenaga Teknis, dan Penilaian yang memiliki Sertifikat	Meningkatnya Jumlah Pustakawan tenaga teknis dan Penilai yang bersertifikat	Meningkatnya Jumlah Pustakawan	Meningkatnya Jumlah Pustakawan
5	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini ketika perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam pelaksanaan dan perkembangan Dinas Perpustakaan permasalahan yang ada dan terjadi pada saat ini dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perpustakaan Kota Makassar yaitu fasilitas sarana dan parasaran gedung layanan yang menjadi skala prioritas dan ini tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahannya. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju kearah yang lebih baik. Permasalahan yang ada akan menjadi isu-isu strategi yang akan menjadi dasar kebijakan pembanguan jangka menengah dan terkait dengan kondisi dan aspek yang sangat penting serta menentukan perkembangan Dinas Perpustakaan Kota Makassar 5 (Lima) tahun kedepan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah adalah Pelayanan publik/pelayanan prima yang memberikan pelayanan Perpustakaan merupakan salah satu tupoksi yang diemban Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Untuk

mewujudkan pelayanan publik yang ideal yang sesuai dengan standar perpustakaan dipengaruhi oleh anggaran, sumber daya manusia sarana dan prasarana yang lengkap. Namun kondisi saat ini sangat jauh dari standar perpustakaan, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- A. Keterbatasan jumlah kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka;
1. Rendahnya sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Agar pelayanan dapat berjalan maksimal, SDM merupakan faktor penting selain sarana dan prasarana. SDM yang diperlukan Dinas Perpustakaan Kota Makassar meliputi tenaga fungsional (Pustakawan) dan tenaga teknis (tenaga non fungsional yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan). Secara umum SDM yang ada di Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk tenaga fungsional pustakawan masih kurang. Tenaga Fungsional Pustakawan yang ada pada Dinas Perpustakaan bertugas menjadi pengelola dan mengawal secara teknis program program kedinasan perpustakaan sebagai penyedia informasi. Desentralisasi dan otonomi daerah juga membawa dampak terhadap perkembangan perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/Kota, salah satunya adalah tingginya mutasi pimpinan perpustakaan daerah yang sebagian besar tidak memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan yang meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, Taman Baca Kecamatan/Kelurahan, Perpustakaan sekolah, dan Perpustakaan Lorong, masih berjalan lambat, Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pustakawan maupun tenaga teknis pengelola perpustakaan menjadi salah satu penyebab;
 2. Perkembangan pengelolaan Perpustakaan sekarang ini dihadapkan pada satu konsep pengelolaan perpustakaan bertaraf international (World class library), yang menekankan pada kualitas layanan dan juga kuantitas koleksi karya-karya ilmiah didalamnya.
 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Ketersediaan Sarana dan Prasarana sangat mendukung pelayanan perpustakaan dimana sangat dibutuhkan ruang pelayanan, ruang staf, ruang pengolahan, ruang deposit dan lain yang mendukung pelayanan. Keterbatasan jumlah kuantitas dan kualitas serta jenis koleksibahanperpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka, layanan perpustakaan belum optimal memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
 4. Belum tersedianya gedung perpustakaan yang representatif sesuai

dengan standar perpustakaan untuk melakukan pelayanan yang sesuai.

5. Rendahnya pemahaman aparaturnya pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan perpustakaan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan public/pelayanan prima layanan perpustakaan	Layanan belum maksimal karena tidak sesuai dengan standar perpustakaan	Standar Layanan Perpustakaan	Anggaran	Kebijakan Anggaran yang diberikan terhadap skpd	1. Ruang pelayanan yang kurang representatif 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia
Pembudayaan kegemaran membaca	Masih kurang	Jumlah kunjungan	Khasana perpustakaan (Koleksi dan sarana dan Prasarana)	Kebijakan anggaran	Ruangan, fasilitas koleksi dan anggaran
Peningkatan SDM	Tenaga Fungsional Masih kurang	Sekurang-kurangnya 2 Pengelola disetiap Perpustakaan sekolah	Penyelenggara pengembangan wawasan dan Dilat Fungsional yang berkelanjutan	Pemahaman tentang penyiapan SDM yang bertugas	Formasi SDM fungsional Pustakawan tergantung Formasi BKD/BKN

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	ISU STRATEGIS			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Asas Daya Guna dan Manfaat Perpustakaan	Kebijakan Peraturan/Perundang-Undangan Perihal Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Akhlak Dalam Implementasi Perpustakaan	

2	Sumber Daya Aparatur Yang Berkomptensif	Percepatan Ilmu dan Teknologi	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Berkomptensif serta Fungsional Pustakawan	
3	Kemajuan Teknologi	Skill atau Keterampilan	Potensi Wilayah Daerah Pemerintah Kota Makassar	

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota Makassar periode 2021-2026 dalam RPJMD adalah :
VISI

Visi pembangunan daerah merupakan rumusan umum mengenai kondisi masa depan Kota Makassar yang ingin dicapai pada akhir periode 2022-2026 yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Oleh karena itu Visi Kepala Daerah terpilih dijabarkan melalui proses perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Visi (RPJPD) 2005-2025 adalah: **“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Terhadap Visi Kota Makassar, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arah RPJPD untuk periode 2020-2025 yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota maritim, niaga, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan bersahabat diharapkan memmanifestasikan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Berdasarkan pemahaman dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka pembangunan daerah Kota Makassar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2021-2026 ini memiliki konsistensi dengan Visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan pada “berorientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai **“Mewujudkan Makassar Kota Dunia”**, serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” dirumuskan sebagai **“Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas kota yang kuat untuk semua”**. Pokok Visi Kota Makassar “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD, dalam Visi RPJMD 2021-2026 ditempatkan sebagai bagian dari substansi **“Kota Dunia”**.

Rumusan Visi Pemerintah Kota Makassar merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada tahun 2026. Rumusan Visi ini mengandung 2 (dua) penjelasan umum dan 3 (tiga) Pokok Visi. Kedua penjelasan umum tersebut merupakan kalimat yang menjelaskan dengan penjelasan umum dan penjelasan masing-masing Pokok Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penjelasan Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021- 2026

Visi	Penjelasan Umum	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” Dengan	Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak	Kota Dunia	Makassar sebagai Kota pelayanan publik (<i>publik services</i>) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan

Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua	sekedar secara normal saja (<i>business as usual</i>) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.		internasional (<i>global chain</i>) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (<i>infrastructures</i>) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.
		<i>Sombere'</i> dan <i>Smart City</i>	Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis "Bugis Makassar" yang ramah tamah dan santun serta

			bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. <i>Sombere'</i> berkaitan dengan <i>Heartware</i> atau "Perangkat Hati", sedangkan <i>Smart City</i> berkaitan dengan <i>Hardware dan Software</i> atau "Perangkat Keras" dan "Perangkat Lunak". Diharapkan dengan <i>Sombere'</i> dan <i>Smart City</i> menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal.
		Imunitas Kota Yang Kuat	Perwujudan Makassar sebagai <i>resilient city</i> yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan.
		Untuk Semua	Kota Makassar sebagai kota

			inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas
--	--	--	---

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran Visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai Visi tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah:

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Misi ini mencakup upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan ummat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “*Sombere’ dan Smart*” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Trilyun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasehat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “*Sombere’ dan Smart*”.

2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.Misi ini mencakup upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan

kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan *Makassar Incorporation*, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ta dan program *Smart Millennial* serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 9). Penguatan *City Branding* dan peningkatan festival dan *MICE* bulanan dalam skala nasional dan internasional.

- 3 Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “*sombere*’ dan *smart city*” untuk semua. Misi ini mencakup upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan, yaitu:). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembentukan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “*waterfront city*” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “*Sombere*’ dan *Smart*” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “*Sombere*’ dan *Smart*” New Balaikota dan New DPRD. Keterkaitan antara Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kota Makassar tahun 2022-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026

Pokok-Pokok Visi	Misi
Kota Dunia	1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM
	Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

<i>Sombere' dan Smart City</i>	2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
Imunitas Kota Yang Kuat	3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang <i>sombere' dan smart city</i> untuk semua.
Untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. 2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. 3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang <i>sombere' dan smart city</i> untuk semua.

Rumusan Misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026

Pernyataan Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang kuat untuk semua		
Misi		Penjelasan Misi
Misi :	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, serta Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama

Misi 2:	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE
Misi3:	Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang <i>sombere' dan smart city</i> untuk semua.	Mewujudkan Makassar menjadi " <i>Livable City</i> " dan " <i>Resilient City</i> " dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif, serta Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari

Selain Visi dan Misi di atas, Pemerintah Kota Makassar juga menggaungkan slogan dan *tagline* sebagai penyemangat seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan Kota Makassar. Tagline tersebut adalah **“Makassar Terus Dua Kali Tambah Baik”**. Tagline ini diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, dimana Bapak Ir. Moh Ramdhan Pomanto menjabat kembali sebagai Walikota Makassar untuk periode kedua. Makassar terus dua kali tambah baik adalah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 (lima) tahun disegala bidang diseluruh Kota Makassar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan pada akhir masa pemerintahan Bapak Ir. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, seluruh aspek kehidupan (*quality of life*) warga Makassar menjadi dua kali tambah baik, baik pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka beberapa upaya yang harus dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar berkaitan dengan beberapa program tersebut adalah dengan mengakomodir ke dalam kegiatan yang ada di dalam permendagri No 90 tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 3.6 kegiatan yang ada di dalam permendagri No 90 tahun 2020

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sub kegiatan permendagri 90 (Nama Header Prioritas Walikota)
1	2	3	4

	Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah	8 Revolusi Pendidikan	Aplikasi Enlilate & ePustaka, Pembuatan Kartu, website
		8 Revolusi Pendidikan	Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah
		Pengembangan Sekolah Non Formal di Pulau dan di Lorong	42 Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kelurahan Kecamatan dan Kepulauan, 0 Sekolah Sentuh Pustaka Menuju Akreditasi sesuai standar Nasional Perpustakaan; Bimtek Pengelola Perpustakaan sekolah, Monev Perpustakaan
		Pengembangan Sekolah Non Formal di Pulau dan di Lorong	33 pengelola perpustakaan kel /kecamatan dan kepulauan
		8 Revolusi Pendidikan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan serta Survey Minat Baca
		Penyediaan Infrastruktur Sekolah yang ramah disabilitas	Pengadaan Buku Fisik dan Elektronik dan Brailer
2	1000 Beasiswa Anak Lorong	Pemetaan anak berprestasi (Prestasi akademik, seni, budaya, olah raga dan keagamaan)	Lomba story telling Tkt. SD, Lomba Resensi Buku, Lomba Penulisan Karya Tulis, Lomba Kreatifitas Anak, Duta Baca Pelajar, Roadshow Duta Baca
		Pembinaan bakat anak berprestasi/ beasiswa	Pelatihan Penulisan literasi, Duta Baca Pelajar,
		Pameran, Dongkel, Dongkelor, bedah buku dan Workshop, mendongeng, Bbursa Buku Murah, workshop Pelayanan	jumlah pengunjung
		Modernisasi Gedung Perpustakaan Kota Makassar	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan melalui Dana DAK

Berikut ini faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

VISI	Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas kuat untuk semua			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi			
	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi	Kurangnya Kompetensi Aparatur ASN dalam	1. Kualitas dan kuantitas masyarakat masih rendah	1. Peraturan perundang undangan Dinas Perpustakaan
	birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi Tujuan Mewujudkan Tata pemerintahan yang bersih dan efektif	memberikan pelayanan 2. Kurangnya SDM dan tenaga fungsional	akan pemanfaatan perpustakaan	aan yang representatif
	Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (melalui perpustakaan yang sesuai dengan standar dan tumbuh kegemaran membaca)	3. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dalam membentuk masyarakat yang berkualitas belum optimal	2. Terbatasnya anggaran Program untuk mendukung peningkatan kapasitas Aparatur ASN, SDM pengelola perpustakaan dengan kualifikasi Pustakawan masih rendah	2. Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang mendukung

	Program Pembinaan Perpustakaan		3.Terbatasnya anggaran program untuk mendukung peningkatan Sarana dan Pranasarana yang memedaia untuk aparatur dan pelayanan	3.Sosialisasi secara langsung ke masyarakat akan pentingnya a literature
--	--------------------------------	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang di maksud adalah (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (Tujuh) agenda pembangunan Nasional. 7 (tujuh) agenda pembangunan Nasional antara lain (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) tujuan pembangunan nasional Dinas Perpustakaan Nasional lebih mengarah kepada tujuan 4 (empat) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan

sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana strategis perpustakaan nasional Tahun 2020-2024. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat.

Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

- 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- 2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
- 3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk

cognitive skill memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”**.

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: **“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”**.

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah: **“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”**.

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, yaitu: **“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”**

Berdasarkan Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 202-2023, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Visi *“Sulawesi Selatan yang Inovatif,*

Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Sasaran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2023 adalah :

1. Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi kaidah perpustakaan;
2. Meningkatnya Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan untuk Pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatnya jumlah OPD yang telah melakukan pengelolaan kearsipan secara baku;
5. Meningkatnya jumlah khasanah Arsip;
6. Meningkatnya jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi;

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan selama 5 tahun tersebut antara lain:

1. Jumlah OPD yang telah melakukan pengelolaan kearsipan secara baku
2. Penambahan khasanah arsip
3. Jumlah arsip yang dimanfaatkan
4. Jumlah perpustakaan desa yang telah mendapat bantuan
5. Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan

6. Terjaganya kelestarian arsip statis yang bernilai sejarah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Tabel 3.8 : Permasalahan dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PerpustakaanKota a Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				
	Terciptanya Manajemen Layanan perpustakaan yang berkualitas berbasis teknologi	Rendahnya mutu penyelenggaraan Perpustakaan pemerintahan daerah	SDM pengelola Perpustakaan dengan kualifikasi pustakawan masih kurang	1. Peraturan perundang undangan bidang perpustakaan yang Refresentatif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				
1	informasi dan komunikasi			
2	Terpenuhinya jumlah SDM Perpustakaan secara proporsional	Pencapaian Target Kinerja Rendah	Apresiasi pegawai negeri penyelenggara pemerintahan masih rendah	2. Kebijakan/P rogram/Kegi atan yang mendukung
3	Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan	Belum terbangunnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan berbasis TIK dilingkungan Pemerintfahan Daerah	Sarana parasarana ruangan pengolahan bahan pustaka serta layanan perpustakaan yang berbasis teknologi IT belum sesuai standar perpustakaan	3. Sosialisasi secara langsung ke masyarakat akan pentingnya literasi

4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pelayanan yang akuntabilitas kinerja yang professional dan transparansi	Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah melakukan usaha-usaha dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan kapasitas kinerja walaupun masih banyak Kekurangan	SDM perpustakaan dengan kualifikasi pustakawan masih rendah	4. Masyarakat berhak atas pelayanan publik yang lebih baik.
		Pencapaian Target Kinerja Rendah	Anggaran masih rendah	5. Kebijakan reformasi Birokrasi
5	Mengembangkan minat baca	Pemenuhan tenaga	SDM pengelola perpustakaan	

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				
	kepada anak-anak, pelajar dan masyarakat dalam upaya gemar membaca dan minat membaca	pustakawan masih kurang	dengan kualifikasi Pustakawan masih rendah	

Tabel 3.9 : Permasalahan dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan Renstra Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Penyelenggaraan system perpustakaan yang sesuai dengan standar	Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan yang berbasis TIK	Belum seimbang tenaga fungsional pustakawan dengan pemustaka yang dilayani	Kebijakan dan Program yang mendukung
2	Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan	Belum presentatifnya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam hal pemenuhan ruang	Terbatasnya Anggaran	Masih menyatuhnya ruangan layanan dengan ruang pengolahan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		layanan, pengolahan dan ruang deposit		Sehingga pemustaka tidak merasa nyaman
3	Meningkatnya Penyelenggaraan perpustakaan Secara Presentative	Rendahnya mutu penyelenggaraan Perpustakaan pemerintahan daerah	Rendahnya Minat Baca	Perlunya sarana promosi dan literatur yang beraragam
		Pencapaian Target Kinerja Rendah	SDM pengelola Perpustakaan (Pustakawan) masih kurang	Kebijakan reformasi Birokrasi
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan perpustakaan n keliling dalam wilayah kota Makassar serta teknis pegolahan pustaka serta Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Rendahnya mutu penyelenggaraan Pengolahan bahan pustaka perpustakaan Pemerintahan Daerah	Sarana parasarana pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka belum tersedia memenuhi standar Manajemen Perkantoran Dengan pengelolaan bahan pustaka yang berbasis TIK belum optimal	
5	Meningkatnya Manajemen dan Layanan Perpustakaan	Pencapaian Target Kinerja Rendah	SDM Pengelola Bahan Pustaka Dengan Standar Perpustakaan	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2024, cakupan wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan dan 153 (seratus lima puluh tiga) kelurahan. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota sebagai kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global dan fungsi perkotaan inti KSN Perkotaan Mamminasata demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota; dan
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut serta pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;
- b. Peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
- c. Penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu;

- d. Pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, jalan tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan;
- e. Pengembangan sistem jaringan transportasiair dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu; dan
- f. Pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota ditetapkan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Rencana pemenuhan RTH dalam wilayah kota terdiri dari :

- a. RTH pada Kawasan kota yang sudah terbangun;
- b. RTH pada Kawasan kota yang belum terbangun;
- c. RTH pada Kawasan reklamasi.

Rencana pemenuhan RTH privat dilaksanakan melalui pemanfaatan halaman pekarangan rumah pada kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri dan pergudangan, sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Perkembangan pengelolaan perpustakaan saat ini dihadapkan pada satu konsep pengelolaan perpustakaan bertaraf internasional (world class library) yang menekankan pada kualitas layanan dan juga kuantitas koleksi karya – karya ilmiah di dalamnya. Ada beberapa indikator dalam menjadi world class library, jika berorientasi pada (a) Service and Collection (pelayanan dan koleksi); (b) Acessibility (aksesibilitas); (c) Variety of Literary offerings (Keanegaragaman literatur yang tersedia); (d) Comfort and avaibility of reading/studying spaces (kenyamanan membaca); dan (e) User Satisfaction (Kepuasan pemustaka).

Salah satu isu hangat yaitu pengembangan konsep world

digital library yang menekankan pada pengelolaan literatur dan koleksi

perpustakaan berbasis pada E-library. Salah satu kriteria mewujudkan world class library yaitu Machine Readable Cataloging (MARC) dalam merekam berbagai jenis literatur; menciptakan standar bersama dalam hal layanan perpustakaan. Perpustakaan digital yang berfokus pada penyediaan dan penyimpanan data baik itu buku atau tulisan, gambar suara, dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan *good governance*, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan *mindset* dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas pelayanan republik.

Pengelolaan perpustakaan menuju world class library menitikberatkan pada kemampuan sumber daya manusia atau pustakawan yang ada di perpustakaan itu sendiri, disadari bahwa kemampuan pustakawan sebagai bagian dari pelaku pendidikan otomatis harus mampu menyesuaikan diri, baik itu melalui peningkatan profesionalisme maupun kemampuan untuk berjejaring memperkuat hubungan dengan sesama pustakawan di tingkat daerah, pusat hingga nasional ke regional, agar pustakawan mampu menjawab tantangan disetiap waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis- teknis perpustakaan.

Isu strategis pada reformasi birokrasi yaitu memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

termasuk menatalaksanakan fungsi layanan perpustakaan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar informasi perpustakaan dapat diakses secara online. Hal ini pada akhirnya menjadi poin penting untuk mendorong proses pembangunan masyarakat di Kota Makassar.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar, dilaksanakan program-program prioritas pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Makassar

Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	
1.1	Tujuan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
1.1.1	Sasaran: Meningkatkan Akseibilitas dan kualitas Pendidikan
	Meningkatkannya pemerataan dan keterjangkauan pendidikan usia dini dan dasar diseluruh kelurahan melalui penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan. Peningkatan kualitas dan

		kuantitas penyediaan easiswa bagi siswa kurang mampu serta peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar melalui peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan budaya dan minat baca.
--	--	--

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota, perlunya menyusun program pembangunan daerah yang juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses pemilihan. Adapun program prioritas Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan Kota Makassar

Berdasarkan pembahasan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan Visi dan Misi Walikota Makassar memiliki Tujuan dari misi adalah: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Efektif"** sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Dinas Perpustakaan Kota Makassar melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota Makassar dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam Misi 1 : **"Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi"**. Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam menjalankan misi ini adalah **Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart"**. Arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik dan Optimalisasi pelayanan publik berbasis *e-government*.

Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun 2021-2026 memiliki **"Meningkatnya Akseibilitas dan kualitas Pendidikan"** Makna dari visi ini berdasarkan kepada pemikiran bahwa peran perpustakaan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diharapkan menjadi sumber informasi dan pembelajaran sepanjang hayat

menuju masyarakat cerdas dan smart city.dengan Indiokator Tujuan sebagai berikut :

1. Angka Budaya Baca Kota Makassar
2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan
3. Jumlah Koleksi Judul yang tersedia Diperpustakaan
4. Jumlah Pustakawan tenaga Teknis, dan Penilaian yang memiliki Sertifikat
5. Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai selama lima (5) tahun kedepan dalam **Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan** adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efesien;
2. Mewujudkan Pelayanan perpustakaan;
3. Tersedianya Koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan;
4. Meningkatnya minat dan kegemaran membaca

Adapun Tujuan dan Sasaran berserta target kinerja tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan :

Tabel 4. *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kota Makassar*

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Akseibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Budaya Baca	50	55	60	65	70
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan	520.000 Orang	540.000 Orang	560.000 Orang	580.000 Orang	600.000 orang
			Jumlah Koleksi Judul yang tersedia Diperpustakaan	27.212 Judul	28.212 judul	29.212 judul	30.212 judul	32.212 judul
			Jumlah Pustakawan tenaga Teknis, dan Penilaian yang memiliki Sertifikat	12 orang dan 38	17 orang dan 4	22 orang dan 44	27 orang dan 47	32 orang dan 50
			Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	704	705	706	707	707

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang diinginkan pada jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Selanjutnya program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD Kota Makassar . Tujuan pembangunan sebagai representatif visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Makassar. Maka tujuan Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah **Meningkatkan Kualits Sumber Daya Manusia** Untuk dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan tersebut, maka di tetapkan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu standar pelayanan dan kualitas layanan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pelayanan masyarakat sebagai faktor pendorong utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pengelola Perpustakaan

Untuk menciptakan dan Meningkatkan Minat Baca serta mendorong jumlah Kunjungan keperpustakaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Terciptanya suasana dan kenyamanan juga kemudahan Pemustaka untuk melakukan akses layanan yang dilakukan dan tawarkan Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk peningkatan Sumber Daya Manusia .Sasaran ini sebagaimana tertuang didalam Arah

kebijakan, sasaran strategi dan program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan Kota Makassar tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Tantangan pembangunan pada peningkatan Sumber Daya Manusia pada saat ini dan masa yang akan datang yaitu Dimana Dinas Perpustakaan Kota Makassar mampu menyediakan generasi-generasi pelanjut yang siap menghadapi dan mampu memberikan kontribusi dan menjawab tantangan kemajuan zaman. Dinas Perpustakaan harus mampu menjawabnya melalui media dan sarana yang menunjang peningkatan pembelajaran sepanjang hayat yaitu Perpustakaan.

Tantangan yang dihadapi layanan Dinas perpustakaan saat ini adalah layanan yang berorientasi pada media, prioritas bagi generasi adalah tergantikannya fisik ke dunia maya Gadget (Media Eletronik) pelaku pemustaka yang akan melakukan dan bentuk Pemberian layanan terpadu dapat diakses secara *online* dan *offline* sehingga memudahkan percepatan pelayanan

Kedua tantangan tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan penggunaan berbagai aplikasi yang mudah digunakan oleh *smartphone* maupun perangkat elektronik lainnya. Tentunya perkembangan teknologi informasi menjadi isu-isu dan strategi dalam pemecahan masalah kebijakan yang sebelumnya masih menggunakan lembaran kertas dan buku yang berbentuk fisik sebagai koleksi yang dapat dibaca langsung dan dijama.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan efektif yaitu **peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya pada perpustakaan sekolah yang berada pada lingkungan kelurahan baik perpustakaan kelurahan dan perpustakaan kecamatan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar pelayanan. Guna terwujudnya Masyarakat Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan”**

Dinas Perpustakaan dalam pencapaian strategi diatas perlu menentukan adanya standar pelayanan Perpustakaan untuk mendorong minat baca Standar pelayanan yang dimaksud merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan transparan. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis yang akan dicapai dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan efektif. Selain adanya penyusunan standar pelayanan, Dinas Perpustakaan Kota Makassar juga diharapkan mampu meningkatkan system informasi layanan publik yang tersedia untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan.

5.2 Arah Kebijakan

Pelaksanaan langkah-langkah strategi juga perlu adanya arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Berikut tahapan arah kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Kota Makassar.

Tabel 5.1 Visi dan Misi Kota Makassar

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk semua			
MISI : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Akseibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkannya pemerataan dan keterjangkauan pendidikan usia dini dan dasar diseluruh kelurahan melalui penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan easiswa bagi siswa kurang mampu serta peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar melalui peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan budaya dan minat baca.	- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 9 tahun diseluruh wilayah Kota Makassar pengarusutamaan alokasi belanja bantuan sosial/hibah/bea siswabagi siswa kurang mampu serat peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang intensif dan pemberian nutrisi tambahan bagi siswa PAUD dan Sekolah Dasar serta penyediaan bahan bacaan dan fasilitas taman baca/

			perpustakaan berbasis digital pada setiap kecamatan/kecamatan dan lorong.
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas perustakaan sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran Pemerintah Kota Makassar di bidang Peningkatan Layanan Publik yang cepat dan berkualitas hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (Tahun 2021 – 2026).

Sebagaimana implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah serta RPJMD Pemerintah Kota Makassar, maka proses pembangunan dibidang Perpustakaan dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program kerja Dinas Perpustakaan diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 2022–2026. Rencana program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan masing-masing terdiri dari subegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

- Evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyediaan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 - Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - Penyusunan Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS
 - Penyediaan jasa jaminan barang Milik Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makan dan Minum
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Pengadaan Mobil Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeluer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeleiharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur
- Rehabilitasi sedang/Berat Rumha Jabatan
- Rehabilotasi sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/Berat Mobil Jabatan
- Rehabilitasisedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
 - Pengadaan Mesin /Kartu Absesni
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
 - Pemulangan Pegawai yang pensiun
 - Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
 - Pemindahan Tugas PNS
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

B. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wiayah Kabupayen/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpusakaan
 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Layanan Perpustakaan
 - Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Bahan Pustaka
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kota

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
- Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
- Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

<p>Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang baik</p>								<p>PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAAM KONDISI BAIK</p>	<p>90 %</p>											
<p>Meningkatkan Kapasitas Sumber Data Aparatur Pengawasan, tata laksana dan Pengawasan</p>	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemerintah</p>								<p>PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>100 %</p>											

							PERSENTASE PERAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS											
		2					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	90 %										
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 149,921,000	7 Dokumen	Rp 149,921,000	7 Dokumen	Rp 156,000,000	7 Dokumen	Rp 156,000,000	7 Dokumen	Rp 156,000,000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	46,438,000	2 Dokumen	46,438,000	2 Dokumen	46,438,000	2 Dokumen	46,438,000	2 Dokumen	46,438,000

								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8,423,000	1 Dokumen	Rp 8,423,000	1 Dokumen	Rp 8,423,000	1 Dokumen	Rp 8,423,000		
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7,618,000	1 Dokumen	Rp 7,618,000	1 Dokumen	Rp 7,618,000	1 Dokumen	Rp 7,618,000		
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7,923,000	1 Dokumen	Rp 7,923,000	1 Dokumen	Rp 7,923,000	1 Dokumen	Rp 7,923,000		
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6,079,000	1 Dokumen	Rp 6,079,000	1 Dokumen	Rp 6,079,000	1 Dokumen	Rp 6,079,000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp 6,079,000	1 Dokumen	Rp 6,079,000	1 Dokumen	Rp 6,079,000		

									Tugas ASN	disediaan									
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	73,670,000	12 Bulan	73,670,000	12 Bulan	73,670,000	12 Bulan	73,670,000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8,063,000	1 Dokumen	8,063,000	1 Dokumen	8,063,000	1 Dokumen	8,063,000
									Administrasi Barang Milik Daerah Peringkat Daerah Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peringkat Daerah	0%	0%		0%	Rp 50,000,000	0%	Rp 50,000,000	0%	Rp 50,000,000
									Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan	0	jenis		2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000

							han Barang Milik Daerah SKPD	han Barang Milik Daerah SKPD													
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Termanfaatkan nya Barang Milik Daerah SKPD	0	jenis		2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000		
							Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Jumlah Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah yang tersedi a	100 %	100 %	Rp 108,350,00 0	10 0 %	Rp 110,350,0 00	100 %	Rp 112,350,0 00	10 0 %	Rp 112,350,0 0	10 0 %	Rp 108,350,000		
							Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk apannya	Jumlah pengad aan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk apannya yang diadaka n	52 Stel	52 Stel	Rp 31,350,000	53 Ste l	Rp 33,350,00 0	55 Stel	Rp 35,350,000	55 Ste l	Rp 35,350,000	52 Ste l	Rp 31,350,000		
							Monitor ing, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah bulan pelaksa naan Monitor ing,	6 kali	6 kali	8,000,000	6 kali	8,000,000	6 kali	8,000,000	6 kali	8,000,000	6 kali	8,000,000		

						Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	7 Orang	7 Orang	69,000,000	7 Orang	69,000,000	7 Orang	69,000,000	7 Orang	69,000,000	7 Orang	69,000,000		
						Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi umum yang tersedia	100%	90%	Rp 788,164,250	90%	Rp 988,164,250	90%	Rp 1,036,164,250	90%	Rp 1,088,164,250	90%	Rp 1,088,164,250		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	Rp 6,922,500	7 Jenis	Rp 6,922,500	7 Jenis	Rp 6,922,500	7 Jenis	Rp 6,922,500	7 Jenis	Rp 6,922,500		

								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	Rp 173,831,750	2 Jenis	Rp 173,831,750	2 Jenis	Rp 173,831,750	2 Jenis	Rp 173,831,750				
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang Logistik Kantor	0	10 Jenis	Rp 29,235,000	10 Jenis	Rp 29,235,000	10 Jenis	Rp 29,235,000	10 Jenis	Rp 29,235,000				
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan yang disediakan	8 Koran	8 Koran	Rp 30,600,000	8 Koran	Rp 30,600,000	8 Koran	Rp 30,600,000	8 Koran	Rp 30,600,000				
								Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Fasilitas kunjungan tamu yang diberi	0	4 jenis	Rp 19,375,000	4 jenis	Rp 19,375,000	4 jenis	Rp 19,375,000	4 jenis	Rp 19,375,000				
								Pengadaan Meubler	Jumlah Pengadaan Moubeler	0			5 Jenis	Rp 200,000,000	5 Jenis	Rp 248,000,000	5 Jenis	Rp 248,000,000	5 Jenis	Rp 248,000,000		
								Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	7 Kali	7 kali	Rp 248,000,000	7 kali	Rp 248,000,000	7 kali	Rp 248,000,000	7 kali	Rp 300,000,000	7 kali	Rp 300,000,000		

							Konsultasi SKPD	konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan										
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Aplikasi	1 aplikasi	Rp 280,200,000	1 aplikasi	Rp 280,200,000	1 aplikasi	Rp 280,200,000	1 aplikasi	Rp 280,200,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	Rp 465,176,625	100%	Rp 815,176,625	100%	Rp 465,176,625	100%	Rp 465,176,625	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		

							ntah Daerah	tersedia											
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	1 unit	Rp 47,447,200	1 unit	Rp 47,447,200	1 unit	Rp 47,447,200	1 unit	Rp 47,447,200		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	14 unit	14 unit	Rp 162,647,000	14 unit	Rp 162,647,000	14 unit	Rp 162,647,000	14 unit	Rp 162,647,000		

							Lapangan													
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	4 Jenis	3 jenis	Rp 4,620,000	3 jenis	Rp 4,620,000	3 jenis	Rp 4,620,000	3 jenis	Rp 4,620,000			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	Rp 7,000,000	1 unit	Rp 7,000,000	1 unit	Rp 7,000,000	1 unit	Rp 7,000,000			
							Pemeliharaan Aset Tak berwujud			1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
							Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	Rp 13,800,000	1 Gedung	Rp 13,800,000	1 Gedung	Rp 13,800,000	1 Gedung	Rp 13,800,000			
							Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	1 Gedung	1 Gedung	Rp -	1 Gedung	Rp 15,000,000	1 Gedung	Rp 20,000,000	1 Gedung	Rp 20,000,000	1 Gedung	Rp 20,000,000	

						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kota Makassar yang dikelola	orang	500 orang	Rp 1,551,843,000	Rp 1,551,843,000	Rp 1,651,843,000	Rp 1,692,843,000	Rp 1,701,843,000			
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan mendapat pemeliharaan	2 aplikasi	2 aplikasi / 12 bulan	231,886,800	231,886,800	231,886,800	231,886,800	231,886,800			
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kota Makassar yang dikembangkan	142 perpustakaan	142 Perpustakaan / 12 Bulan	434,947,200	434,947,200	534,947,200	575,947,200	584,947,200			
						Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah	Jumlah Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Kab/Kota	jenis	4 Jenis	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000			

						Kab/Kota													
						Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kab/Kota sesuai Standar Pperustakaan	10 Perpustakaan yang terakreditasi	10 Perpustakaan yang terakreditasi	484,500,000	484,500,000	484,500,000	484,500,000	484,500,000	484,500,000				
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan	0	1 kgt / 50 Peserta	Rp 55,938,000	Rp 55,938,000	Rp 55,938,000	Rp 55,938,000	Rp 55,938,000	Rp 55,938,000				

						Kabupaten/Kota	kota makassar yang dilaksanakan										
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 549,820,000	5 Kegiatan	Rp 549,820,000	5 Kegiatan	Rp 549,820,000	5 Kegiatan	Rp 549,820,000	
						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	jumlah penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang diberikan	3 Pemenang Lomba	5 Pemenang Lomba	1,325,037,500	5 Pemenang Lomba	1,325,037,500	5 Pemenang Lomba	1,325,037,500	5 Pemenang Lomba	1,325,037,500	

						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan kota makassar yang dibangun dan mendapat pemeliharaan	1 Gedung		Rp -		Rp 200,000,000		Rp 100,000,000		Rp 100,000,000		Rp 200,000,000		
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah literasi berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	0	1 Kgt	Rp 56,498,000	1 Kgt	Rp 56,498,000	1 Kgt	Rp 56,498,000	1 Kgt	Rp 56,498,000	1 Kgt	Rp 56,498,000		
						Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kota	jumlah peserta duta baca yang terpilih pada tingkat provinsi	0			1 kgt	Rp 86,498,000	1 kgt	Rp 86,498,000	1 kgt	Rp 86,498,000	1 kgt	Rp 86,498,000		

						PROGR AM PELESTA RIAN KOLEKSI NASION AL DAN NASKAH KUNO	Persent ase Koleksi kuno Yang Dilestari kan	50 %		Rp 522,311,50 0	Rp 576,215,0 00	Rp 619,236,0 00	Rp 4,284,170,0 00	Rp 4,287,660,00 0		
						Pelestari an Naskah Kuno Milik Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Kota Makassa r yang dilestasi kan	703 Judu l	703	Rp 174,810,500	Rp 204,814,0 00	Rp 216,735,00 0	Rp 229,669,000	Rp 229,669,000		
	2	1 4	0 2	2	0 2	Peningk atan Peran Serta Masyara kat dalam Penyim panan, Perawat an, Pelestari an, dan Pendaft aran Naskah Kuno	Jumlah Peningk atan Peran serta Masyara kat dalamPe nyimpa nan, Perawat an, Pelestari an, dan Pendaft aran Naskah Kuno yang dilaksan akan	2 Kgt FGD	2 Kgt FGD	Rp 149,684,000	Rp 169,684,0 00	Rp 178,840,00 0	Rp 189,684,000	Rp 189,684,000		

							Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihan mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarian dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat yang dikelola dan dialihme diakan untuk pelestarian dan pendayagunaan	2kgt	2kgt	Rp 25,126,500	Rp 35,130,000	Rp 37,895,000	Rp 39,985,000	Rp 39,985,000			
	2	1 4	0 2	2	0 2	0 1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh pemerintah Daerah			Rp 347,501,000	Rp 371,401,000	Rp 402,501,000	Rp 4,054,501,000	Rp 4,057,991,000			
	2	1 4	0 2	2	0 2	0 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	2kgt	2kgt	Rp 331,501,000	Rp 351,501,000	Rp 381,501,000	Rp 4,031,501,000	Rp 4,031,501,000			

							ra yang dilaksanakan													
		2	1	0			Pengolahan dan Penyian gan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengola han dan Penyian gan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilaksan akan	2 kgt	2 kgt	Rp 16,000,000	Rp 19,900,000	Rp 21,000,000	Rp 23,000,000	Rp 26,490,000					

Makassar,
Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar



ENRI A. PALALLO, S.Sos., Msi
Nip: 19680412 199603 2 005

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode	Capaian kinerja program						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Pendidikan	Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam Kondisi baik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	100%	100%	100%	100%	00%	100%	
		Angka Budaya Baca	44,85 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70%	70%	
		Jumlah pengunjung Perpustakaan	86,527 %	520.000 org/thn	540.000 org/thn	560 org/thn	580 org/thn	600 org/thn	600 org/thn	
		Jumlah Koleksi Judul yang tersedia di Perpustakaan	26.22 Judul (perpustak	27.72 judul	28.72 judul	29.72 Judul	30.72 judul	33.72 judul		

		Daerah	aan Umum, Khusus, Fisik dan Digital)	40 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %
		Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	703	704	705	706	707	708	708
		Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat	7 Pustakawan, 33 Tenaga Teknis	12 Pustakawan	17 Pustakawan	22 Pustakawan	27 Pustakawan	32 Pustakawan	32 Pustakawan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, yang merupakan kebijakan pemerintah yang mengarah pada peningkatan kemandirian dalam budaya gemar membaca yang salah satu agenda prioritas pemerintah yang mengarahkan programnya pada penguatan mentalisasi budaya gemar membaca melalui berbagai layanan perpustakaan dengan keragaman koleksi bahan bacaan yang berkualitas.

Program perpustakaan sangat erat hubungannya dengan pembentukan karakter masyarakat karena melalui membaca dapat menumbuhkembangkan kemandirian. Kebudayaan yang menjurus pada pembentukan mental masyarakat yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai-nilai kegotongroyongan sesuai dengan UUD 1945. Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental melalui perpustakaan adalah meningkatkan minat baca yang dilaksanakan secara baik. Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2022-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan limatahunan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan

sampai dengan tahun 2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kota Makassar 2021-2026 :

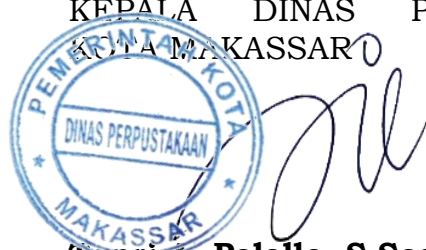
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua” Makassar

Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua”.

Pada akhirnya Dinas Perpustakaan Kota Makassar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.

Makassar, 3 September 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA MAKASSAR



Terry A. Palallo, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680412 199603 2005

TABEL 4
RANCANGAN RENJA AKHIR TAHUN 2021
DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA MAKASSAR

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022			
KODE ORGANI SASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
				DINAS PERPUSTAKAAN					
				PENDIDIKAN					
				PERPUSTAKAAN		9,834,925,550			
				URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	5,829,415,550	APB D	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90%				
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%				
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	KOTA MAKASSAR	6 Dokumen	149,921,000	APBD

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	KOTA MAKASSAR	2 Dokumen	46,438,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 8,423,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 7,618,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 7,923,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 6,079,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen		APBD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 73,440,000	APBD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	KOTA MAKASSAR		3,471,837,075	APBD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	KOTA MAKASSAR	14 Bulan	3,204,704,075	APBD
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	KOTA MAKASSAR	14 Bulan	185,400,000	APBD
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	KOTA MAKASSAR	12 Bulan	73,670,000	APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 Laporan	8,063,000	APBD
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	KOTA MAKASSAR	1 tahun /2 DOKUMEN		APBD

				Bulanan/Semesteran					
				Penyusunan Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi	Jumlah Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun	KOTA MAKASSAR	2 DOKUMEN		APBD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia		12 Bulan	Rp 108,350,000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kota Makassar	52 Stel	Rp 31,350,000	APBD
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar	12 bulan	8,000,000	APBD
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	Kota Makassar	6 Orang	69,000,000	APBD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia	KOTA MAKASSAR	5 jenis	788,164,250	APBD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan yang tersedia	Kota Makassar	7 Jenis	Rp 6,922,500	APBD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	2 Jenis	Rp 173,831,750	APBD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	2 Jenis	Rp 29,235,000	APBD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Makassar	8 Koran	Rp 30,600,000	APBD
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kota Makassar	2 Jenis	Rp 19,375,000	APBD
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	Kota Makassar	7 Kali	Rp 248,000,000	APBD

				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	1 Aplikasi	Rp 280,200,000	APBD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Makassar	1 Jenis	Rp 468,176,625	APBD
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Makassar	1 Unit	Rp 468,176,625	APBD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	Rp 607,452,400	APBD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan Ekspedisi yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan	Rp 159,254,400	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan	Rp 86,388,000	APBD
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	Rp 34,710,000	APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	Rp 327,100,000	APBD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Kota Makassar	100%	Rp 235,514,200	APBD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Kota Makassar	1 unit	Rp 47,447,200	APBD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat	Kota Makassar	13 unit	Rp 162,647,000	APBD

				Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin/berkala				
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Makassar	4 Jenis	Rp 4,620,000	APBD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	1 unit	Rp 7,000,000	APBD
				Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	1 Gedung	Rp 13,800,000	APBD
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Budaya Baca	KOTA MAKASSAR	50%	3,483,198,500	APBD
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun		460,000		
					Jumlah Koleksi Judul yang tersedia diperpustakaan Daerah		272.212 judul		
					Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat		7 Orang		
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kota Makassar yang dikelola	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 1,551,843,000	APBD
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan mendapat pemeliharaan	KOTA MAKASSAR	2 aplikasi	231,886,800	APBD
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kota Makassar yang dikembangkan	KOTA MAKASSAR	142 perpustakaan	434,947,200	APBD
				Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Koleksi Judul Kekhasan Daerah yang tersedia diperpustakaan	KOTA MAKASSAR	5 Judul	9,000,000	APBD
				Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kab/Kota sesuai	KOTA MAKASSAR	10 Perpustakaan yang terakreditasi	484,500,000	APBD

				sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Standar Nasional Pperustakaan				
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan kapasitas	KOTA MAKASSAR	1 kgt / 50 Peserta	Rp 55,938,000	APBD
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dan Dikembangkan	KOTA MAKASSAR	12 Bulan /kegiatan pengolahan buku	Rp 216,009,000	APBD
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	KOTA MAKASSAR	1 Dokumen	Rp 119,562,000	APBD
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kota makassar yang dilaksanakan	KOTA MAKASSAR	%	Rp 1,931,355,500	APBD
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	KOTA MAKASSAR	5 Kegiatan	549,820,000	APBD
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang menjadi kewenangan kota makassar yang dibangun dan mendapat pemeliharaan	KOTA MAKASSAR	1 Gedung		APBD
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang diberikan	KOTA MAKASSAR	3 Pemening Lomba	1,325,037,500	APBD
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah literasi berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	KOTA MAKASSAR	1 Kgt	56,498,000	APBD
				Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta duta baca yang terpilih pada tingkat provinsi	KOTA MAKASSAR	1 kgt		APBD

				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi kuno Yang Dilestarikan	KOTA MAKASSAR	50%	Rp 522,311,500	APBN
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Kota Makassar yang dilestarikan	KOTA MAKASSAR	703 Judul	Rp 174,810,500	APBD
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno yang dilaksanakan	KOTA MAKASSAR	2 Kgt FGD	Rp 149,684,000	APBD
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat yang dikelola dan dialihmediakan untuk pelestarian dan pendayagunaan	KOTA MAKASSAR	2kgt	Rp 25,126,500	APBD
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan	KOTA MAKASSAR	2 Kegiatan /Laporan	Rp 347,501,000	APBD
				Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilaksanakan	KOTA MAKASSAR	2kgt	Rp 331,501,000	
				Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilaksanakan	KOTA MAKASSAR	2 kgt	Rp 16,000,000	APBD

Makassar, 03 Agustus

Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar



IRIP: A. PALALLO, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19680412 199603 2 005

